



LAPORAN KINERJA 2024

KANWIL DJKN KALIMANTAN
SELATAN DAN TENGAH



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya yang tak terhingga kepada kami semua di lingkup Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, sehingga kami beserta segenap jajaran dapat mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab, serta dapat meraih target yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Cerminan dari rasa syukur ini kami wujudkan dalam berbagai aktivitas kerja di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yaitu bekerja dengan semangat, memberikan yang terbaik, dengan hasil kinerja yang membanggakan. Dukungan dan bimbingan serta layanan terbaik yang diberikan oleh Bapak Direktur Jenderal beserta seluruh jajaran Sekretaris dan Direktur serta Tenaga Pengkaji di lingkup Kantor Pusat Ditjen Kekayaan Negara juga telah menjadi salah satu kekuatan terbaik yang dimiliki oleh Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar **116,95%**, yang mengalami peningkatan dari capaian NKO tahun sebelumnya. Hal ini merupakan bukti keseriusan dari kami beserta seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam meningkatkan kualitas kinerja dan menerapkan manajemen risiko. Implementasi dan penguatan kode etik aparatur sipil negara, nilai-nilai anti korupsi dan anti gratifikasi terus dilaksanakan secara konsisten guna mendukung pencapaian dari hasil kinerja pegawai. Berbagai inovasi diciptakan dalam rangka mendukung pelaksanaan probis, dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi unit kerja kanwil. Kami bersama telah berkomitmen menjadikan akuntabilitas dan integritas sebagai kunci dalam pemberian pelayanan terbaik.

Berbagai prestasi dan penghargaan juga kembali diperoleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah pada periode tahun 2024. Hal ini tentu menjadi pemacu semangat bagi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah untuk terus meningkatkan kinerja terbaiknya, sebagaimana pesan inspiratif Ibu Menteri Keuangan yakni : “Selalu ada ruang untuk perbaikan.” dan “Janganlah lelah mencintai negeri ini.”. Sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan Satu baik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta seluruh pemangku kepentingan juga menjadi pelengkap dari penyelesaian target yang telah ditetapkan, sehingga bukan suatu hal yang berlebihan kiranya di tahun 2025 ini Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berharap untuk bisa terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja terbaiknya dengan perencanaan yang matang, rencana aksi yang efektif, monev yang konsisten dan terukur, serta perbaikan yang terus menerus.



Di tahun ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah tetap berkomitmen guna menjaga keberlanjutan implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan terus menegakan Nilai-Nilai dan Budaya Kementerian Keuangan serta Kode Etik ASN, demi masa depan terbaik generasi muda penerus bangsa Indonesia 2045.

Sebagai penutup, kami seluruh jajaran di lingkup Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas sinergi, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak baik internal kementerian keuangan ataupun eksternal kementerian lembaga serta pemerintah daerah selama tahun 2024. Semoga konsistensi, komitmen, sinergi dan kolaborasi bersama berlandaskan akuntabilitas dan integritas dapat terus kita tegakan bersama.

Banjarbaru, 3 Februari 2025
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas dan Fungsi	6
C. Isu Strategis	8
D. Struktur Organisasi	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	14
B. Matriks Kinerja dan Pendanaan DJKN Tahun 2021-2024	17
C. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi 2024	21
B. Analisa atas Efisiensi Sumber Daya	65
C. Kinerja Lainnya	66
D. Realisasi Anggaran	85
BAB IV PENUTUP	93



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, agar lebih efektif dan efisien maka dibentuk unit-unit vertikal DJKN di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki wilayah kerja mencakup 3 KPKNL yaitu KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalan Bun, dan KPKNL Banjarmasin. Sebagai instansi pemerintah, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara

dan lelang. Untuk mendukung tugas tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
3. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
6. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa;
10. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, setiap bagian/bidang pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis



beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan dan akuntansi, di bidang kekayaan negara, serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

3. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, serta penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

4. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi, dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang, dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang.

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.



C. Isu Strategis

Dalam upaya pencapaian realisasi kinerja selama Tahun 2024, beberapa isu strategis menjadi tantangan yang turut mewarnai perjalanan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah serta memberikan dorongan untuk terus melakukan perbaikan di segala hal dalam pencapaian penyempurnaan. Beberapa isu strategis dimaksud antara lain:

1. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Dengan total nilai BMN di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah yang terus meningkat, mencapai Rp. 130,2 triliun hingga akhir Desember 2024, Kanwil DJKN Kalselteng berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan aset. Secara umum di luar pelaksanaan tugas yang menjadi tugas dan fungsi, tercermin melalui *key performance indicator* yaitu pengamanan BMN melalui penertiban sertifikat BMN berupa tanah, pengukuran kinerja BMN - portofolio asset dan pengukuran serta rekomendasi Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK).

2. Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah aktif melakukan kunjungan dan monitoring ke pemerintah daerah, kunjungan ini terkait tugas dan fungsi baik pengelolaan asset, pengelolaan piutang daerah penilaian Barang Milik Daerah dan pelayanan lelang. Dalam berbagai kesempatan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah juga melakukan diseminasi terhadap profesi fungsional Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah dan Penata laksana barang serta lelang hak menikmati.

3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBN

Melalui publikasi laporan keuangan dan realisasi APBN regional, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara.

4. Pengembangan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

Sebagaimana tercantum dalam diktum pertimbangan PerMenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2021 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengembangan ini dilaksanakan salah satunya dengan menyampaikan pemaparan terkait mekanisme pembentukan PFPP di lingkup Instansi Pengguna.

5. Perubahan ketentuan terkait pelaksanaan lelang



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2024 tentang Risalah Lelang merupakan salah satu ketentuan yang ditetapkan di Tahun 2024 dan penyesuaian di lapangan perlu dilaksanakan dalam pelaksanaannya. Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah terus melakukan sosialisasi kepada stakeholder agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

6. *Piloting Implementasi portal lelang.go.id versi 2*

Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menjadi salah satu Kanwil DJKN yang di Tahun 2024 mendapatkan *privilege* dari Direktorat Lelang untuk mengimplementasikan portal *lelang.go.id* versi 2. Untuk itu berbagai upaya pendistribusian informasi kepada stakeholder serta memastikan kesiapan para PIC lelang cukup memerlukan perhatian khusus.

7. *Pemilihan strategi dalam pencapaian penurunan outstanding piutang negara*

Dalam upaya mencapai penurunan outstanding piutang negara memerlukan strategi yang inovatif untuk meningkatkan efektifitas penurunan outstanding piutang negara.

8. *Tantangan dalam Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN):*

Banyaknya kasus piutang negara yang kompleks, termasuk kasus dengan nilai besar, menuntut koordinasi intensif dengan instansi terkait dan kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga. Tantangan muncul ketika koordinasi antar lembaga tidak berjalan lancar, yang dapat memperlambat proses penagihan.

9. *Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani*

Sebagai upaya keberlanjutan dalam pembangunan Zona Integritas, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah telah berkomitmen untuk melanjutkan keberhasilan dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ini dengan bersiap untuk menuju unit dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan tersebut dilakukan dengan menegakkan nilai-nilai budaya Kementerian Keuangan serta kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini bertujuan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menguatkan integritas birokrasi.



D. Struktur Organisasi



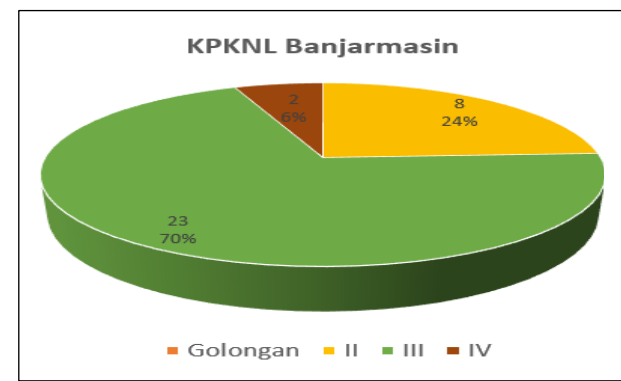
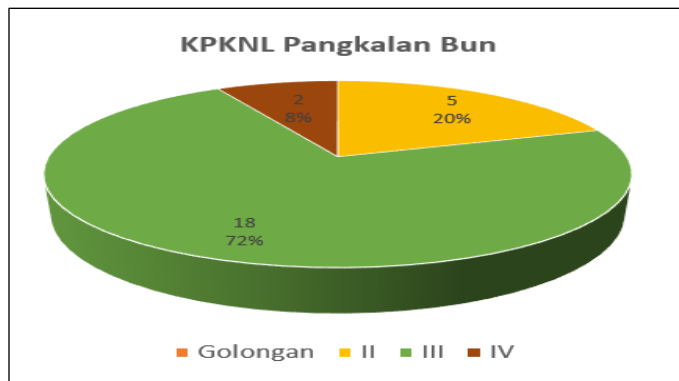
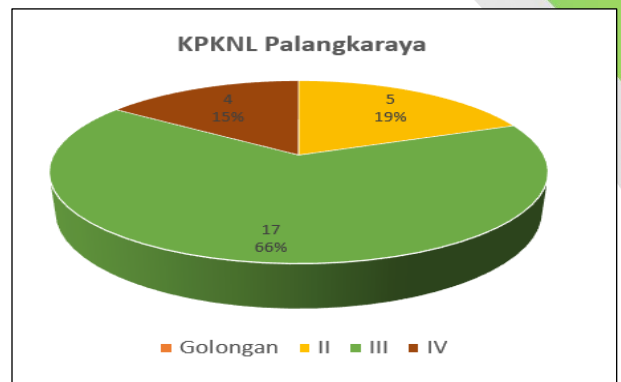
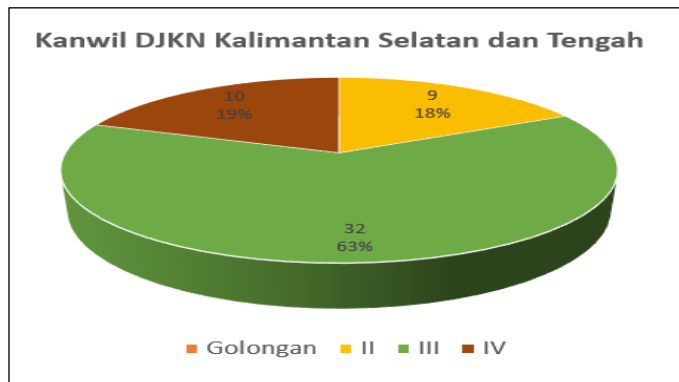
Keterangan:

Tahun Anggaran 2024 (sampai dengan Desember 2024) terdapat kekosongan Kepala Bidang Piutang Negara, sehingga Plt. Kabid Piutang Negara diemban oleh Kepala bagian Umum

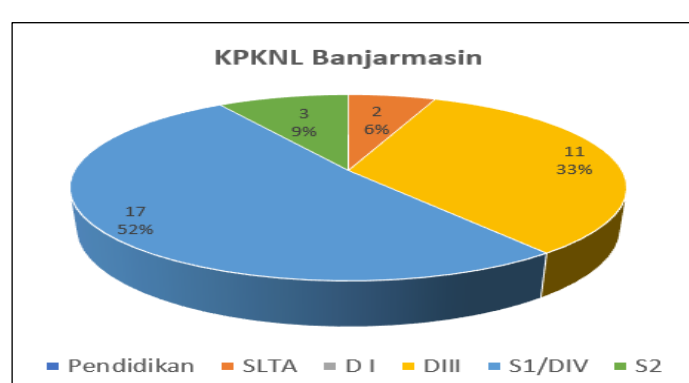
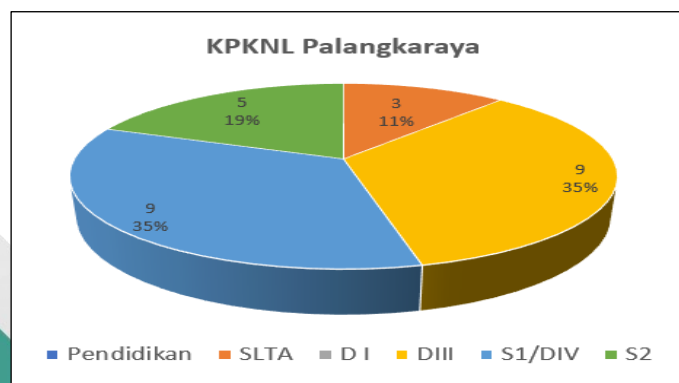
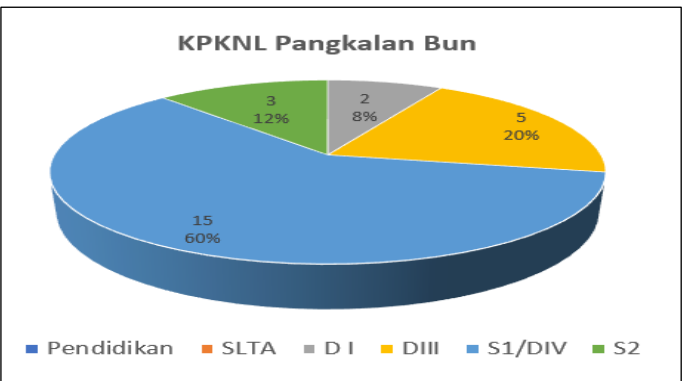
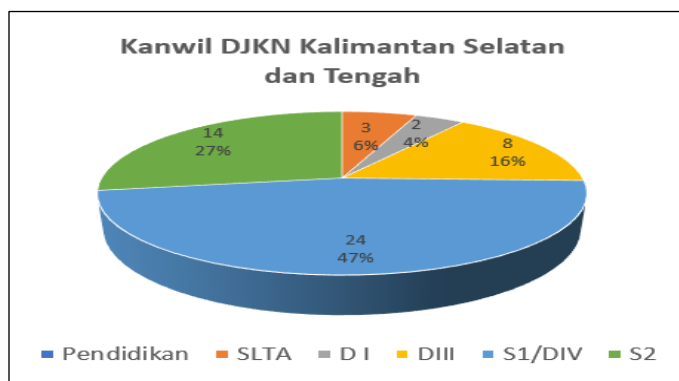


1) Matriks Pegawai

1. Golongan Kepangkatan



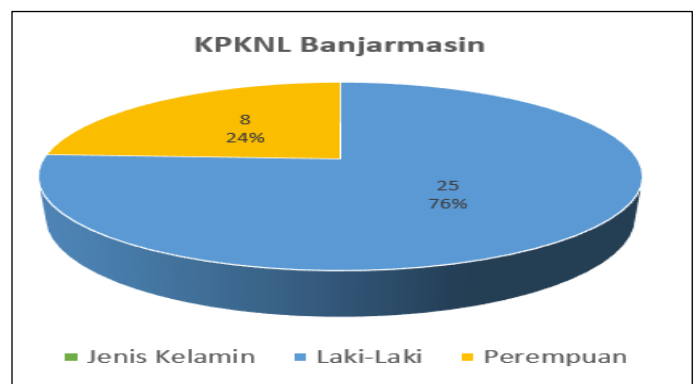
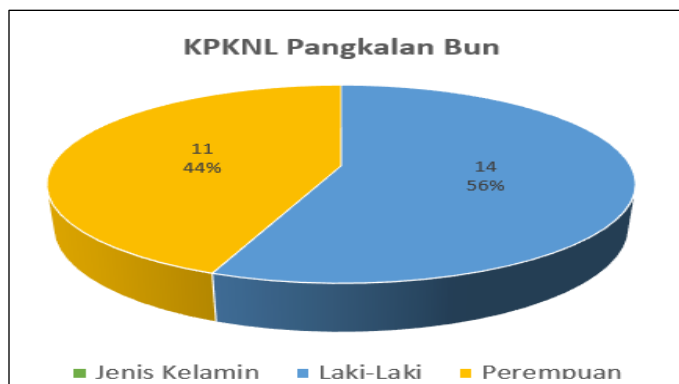
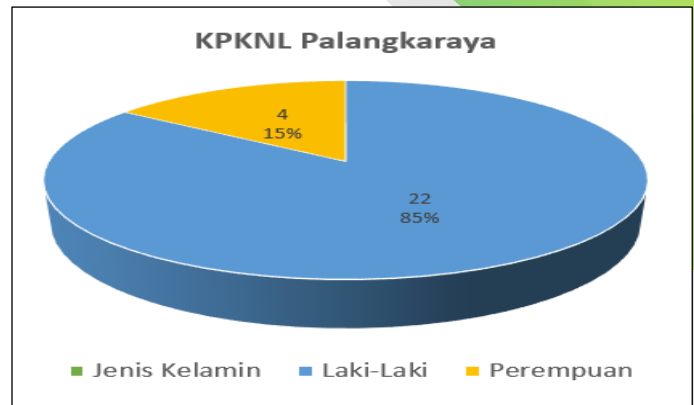
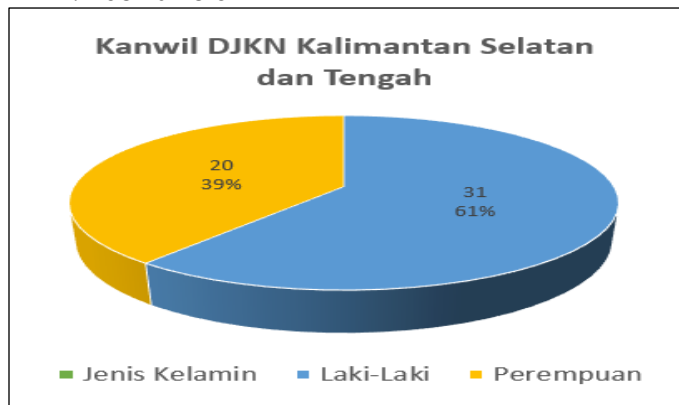
2. Pendidikan



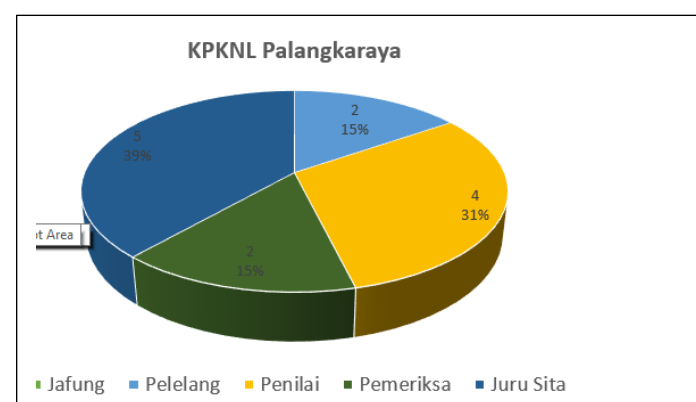
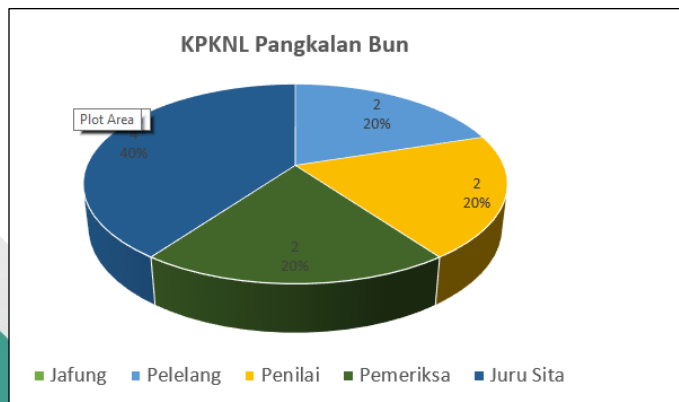
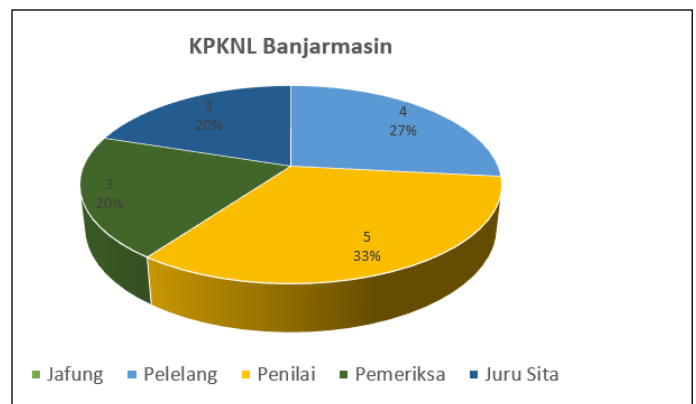
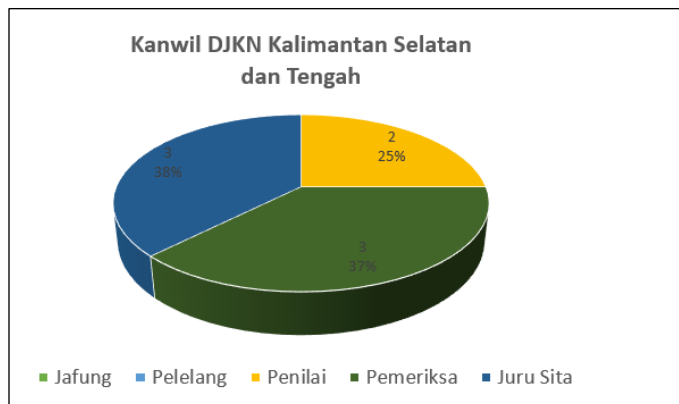


LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

1. Jenis Kelamin



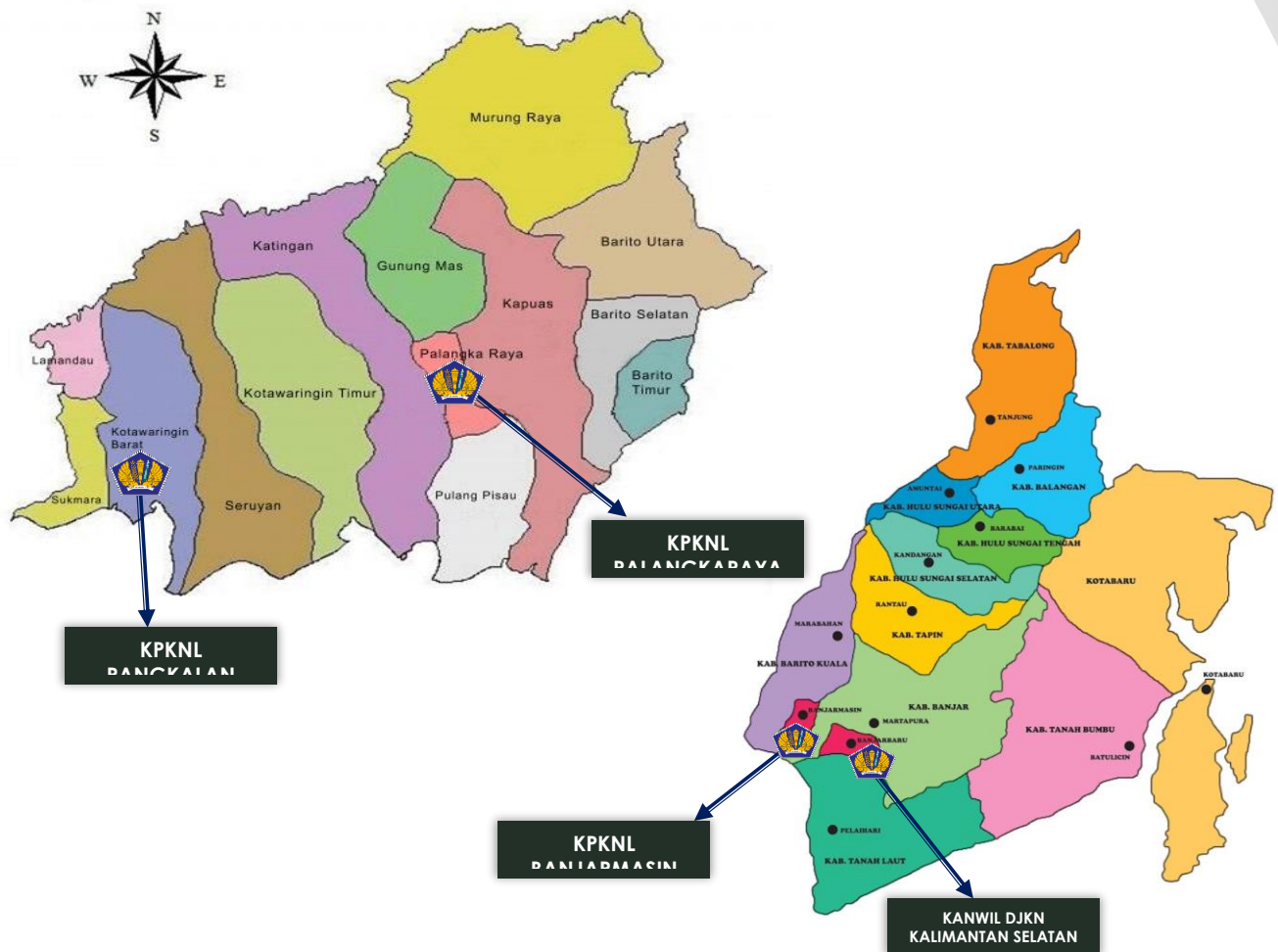
2. Jabatan Fungsional



2) Wilayah Kerja

Kanwil DJKN Kalimantan Tengah dan Selatan membawahi tiga kantor layanan:

1. KPKNL Palangkaraya (wilayah kerja meliputi 9 Kabupaten/Kota)
2. KPKNL Pangkalan Bun (wilayah kerja meliputi 5 Kabupaten/Kota)
3. KPKNL Banjarmasin (wilayah kerja seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 13 Kabupaten/Kota)





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Rencana strategis menjadi bahan acuan dalam proses manajemen kinerja secara keseluruhan yang meliputi:

1. Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (*workplan and budget*);
3. Penyusunan penetapan kinerja (*performance agreement*);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan; dan
5. Penyusunan laporan kinerja.

Rencana Strategis DJKN ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Renstra DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, dimana termuat dalam Renstra tersebut **visi DJKN yakni "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"**.

Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari "Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Adapun indikator dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:



No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial							
	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	55%	57%	60%	65%	70%	Dit. BMN
		Implementasi evaluasi kinerja BMN berupa tanah dan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. BMN
		Persentase bidang tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. BMN (Lead)
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. BMN (Lead)
		Indeks implementasi pengasuransian BMN	50 (Skala 100)	55 (Skala 100)	60 (Skala 100)	65 (Skala 100)	70 (Skala 100)	Dit. BMN
		Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	100%	100%	100%	100%	Dit PNKNL
		Indeks efektivitas penyelesaian peraturan	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	70 (Skala 100)	Dit Huhu (Lead)
		Tingkat akurasi data piutang negara	-	-	50%	100%	-	Dit. PNKNL
	Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	4 (Skala 5)	Dit. KND



2.	Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya							
	Pengelolaan lelang yang optimal	Persentase pencapaian hasil lelang (pokok lelang)	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. Lelang
		Persentase produktivitas lelang	32%	34%	34%	34%	34%	Dit. Lelang
3.	Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien							
	Penilaian yang berkualitas	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	29%	28%	27%	26%	Dit. Penilaian
		Pemenuhan Target Pengembangan Profesional Berkelanjutan (CPD) Penilai Pemerintah	-	100%	100%	100%	100%	Dit. Penilaian
4.	Birokrasi dan layanan publik DJKN yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,00 (Skala 5)	4,05 (Skala 5)	4,10 (Skala 5)	4,15 (Skala 5)	4,20 (Skala 5)	Setditjen (Lead)
		Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%	-	-	Setditjen
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	Setditjen
		Persentase Pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya	87,83 %	87,83 %	87,83 %	87,83 %	87,83 %	Setditjen
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	Setditjen (Lead)
	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Dit. PKNSI
		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	85%	87%	90%	92%	95%	Dit. PKNSI
	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	Indeks integritas	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	Setditjen
		Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti	89%	89,5%	89,5 %	90%	90%	Setditjen (Lead)
		Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	70%	75%	75%	80%	80%	Dit. BMN (Lead)
	Komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	Dit. Huhu



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

B. Matriks Kinerja dan Pendanaan DJKN Tahun 2021-2024

Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA										
PROGRAM	PENGLOLAAN PERBENDAHARAAN, KEKAYAAN NEGARA, DAN RISIKO					109.508,038	122.897,695	125.237,308	127.625,089	DJKN
Sasaran Program 2	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial									
Indikator Program	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	57%	60%	65%	70%					
Kegiatan 1	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					10.623,490	10.765,844	10.910,107	11.056,302	
Sasaran Kegiatan	Kebijakan dan Keputusan Administratif di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel									
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks efektivitas kebijakan	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)					
Kegiatan 2	Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					6.305,885	6.390,383	6.476,015	6.562,793	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko									

Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)					
Kegiatan 3	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara					1.735,365	1.758,618	1.782,184	1.806,065	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kas Negara yang Prudent dan Optimal									
Indikator Sasaran Kegiatan	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	4,50%	4,50%	4,25%	4,25%					
Kegiatan 5	Pengelolaan Aset					90.141,028	103.271,168	105.347,785	107.469,046	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan aset yang Profesional, Tertib, Optimal serta Akuntabel									
Indikator Sasaran Kegiatan	a. Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)					
	b. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN	100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 6	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara					354,995	359,751	364,572	369,457	
Sasaran Kegiatan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu									
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%	89,5%	90%	90%					
Kegiatan 7	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					347,274	351,928	356,644	361,423	
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko									



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

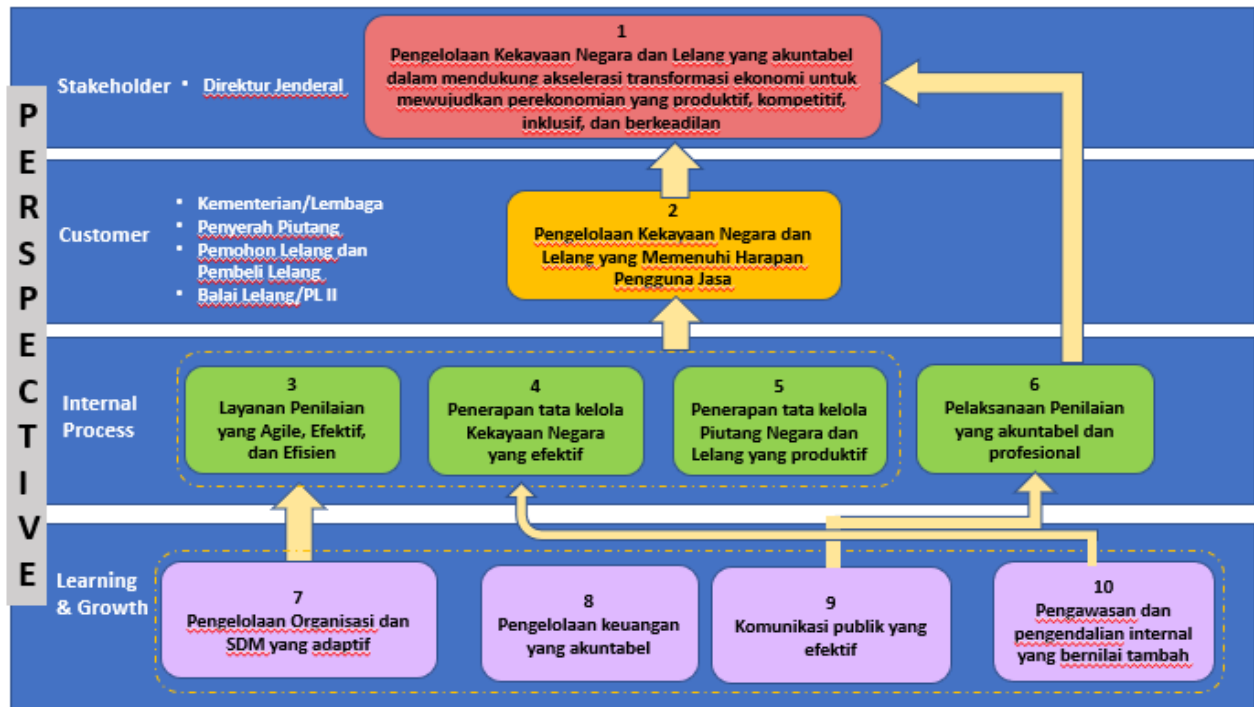
Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase tindak lanjut pengelolaan aset	75%	75%	80%	80%					
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN					745.722,618	745.830,973	757.231,895	768.830,822	
Sasaran Program 1	Organisasi dan SDM yang Optimal									
Indikator Kinerja Program 1	a. Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4,05 (skala 5)	4,1 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,2 (skala 5)					
	b. Tingkat implementasi learning organization	77%	80%	82%	85%					
Sasaran Program 2	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi									
Indikator Kinerja Program 2	a. Tingkat downtime sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%					
	b. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%	90%	92%	95%					
Sasaran Program 3	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah									
Indikator Kinerja Program 3	Indeks integritas	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)					
Kegiatan 1	Pengelolaan Organisasi dan SDM					388.722,817	396.880,243	403.498,344	410.244,768	
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi									
Indikator Sasaran Kegiatan	a. Persentase penyelesaian delayering	100%	100%	-	-					
Nomenklatur	Uraian	Target				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC
(1)	(2)	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	(11)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
Kegiatan 2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum					332.030,434	323.452,317	327.880,669	332.375,220	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel									
Indikator Sasaran Kegiatan	a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95%	95%	95%	95%					
	b. Tingkat kualitas pengelolaan BMN	80%	80%	80%	80%					
Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi					17.217,010	17.552,265	17.794,580	18.038,994	
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal									
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%	90%	92%	95%					
Kegiatan 4	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik					1.934,494	1.960,416	1.986,685	2.013,307	
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan									
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)	3,5 (Skala 4)					
Kegiatan 5	Legislasi dan Litigasi					3.416,370	3.462,149	3.508,542	3.555,556	
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal									
Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi	72,5	75	77,5	80					
Kegiatan 6	Pengendalian dan Pengawasan Internal					2.401,492	2.523,581	2.563,074	2.602,975	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif									



C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini selaras dengan program pengelolaan kinerja yang telah dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan yang didasarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berikut ini adalah Peta Strategi DJKN 2024 berikut IKU yang telah ditetapkan pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, yaitu:



Kode		IKU	Target 2024
	Stakeholder Perspective (30%)		
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan		
1a-CP	Indeks Integritas		89.17
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		43,35M
	Customer Perspective (20%)		
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		100.00%
	2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.65%



	2a2-N	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86.50%
2b-CP		Persentase Realisasi Pokok Lelang	747,45M
2c-CP		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	12,59M
3		Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	
3a-N		Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
		<i>Internal Process Perspective (25%)</i>	
4		Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	
4a-CP		Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan (Sesuai Target Kriteria)	100.00%
4b-N		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100.00%
5		Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	
5a-CP		Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	73.00%
5b-CP		Persentase produktifitas lelang	89.00%
6		Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	
6a-CP		Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16.00%
		<i>Learning & Growth Perspective (25%)</i>	
7		Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	
7a-N		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
7b-N		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100.00%
7c-N		Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75.00%
8		Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
8a-CP		Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00%
8b-N		Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	15.00%
9		Komunikasi Publik yang efektif	
9a-CP		Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3.55%
9b-N		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80.00%
10		Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah	
10a-CP		Indeks efektifitas UKI	82.00%
10b-N		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100.00%

Target diatas sudah termasuk *addendum* yang dilaksanakan pada Triwulan III dan IV, karena terdapat perubahan target dan/atau trajektori target baru pada UPK di lingkungan DJKN terhadap IKU:

1. Persentase Realisasi Pokok Lelang;
2. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Pitang Negara);
3. Persentase Penurunan Outstanding Piutang;
4. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

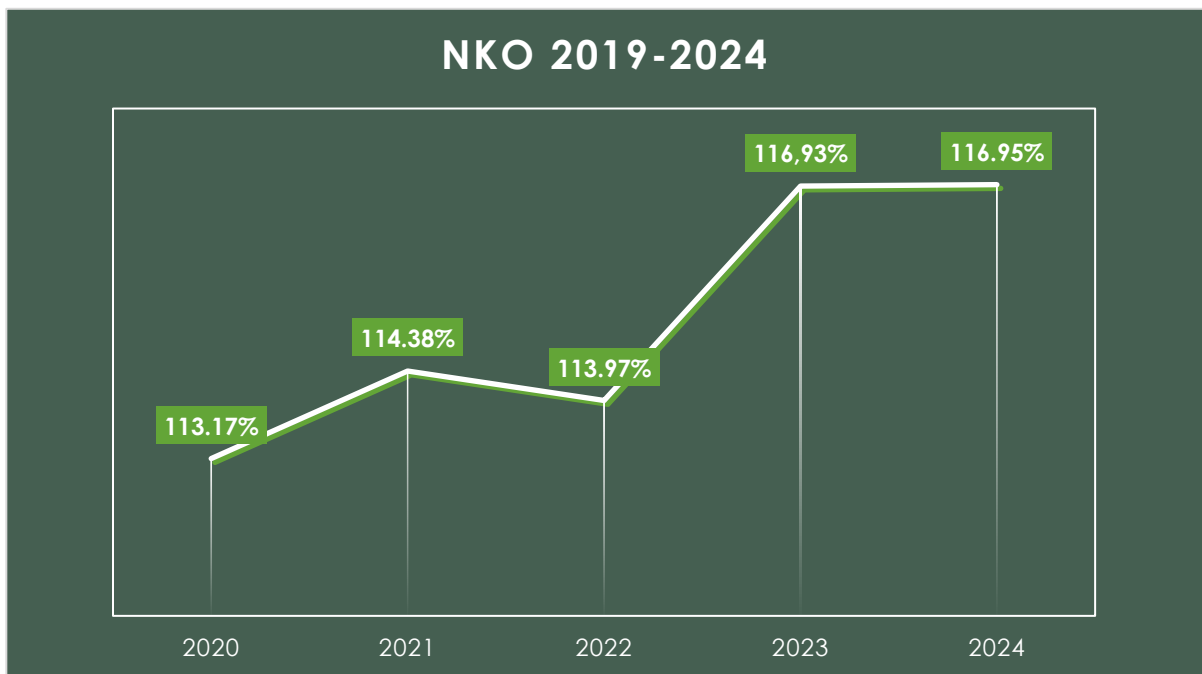
A. Capaian Kinerja Organisasi 2024

Pada tahun 2024 ini Nilai Kinerja Organisasi pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebesar **116,95%**. Adapun pencapaian secara keseluruhan atas masing-masing IKU tergambar pada tabel berikut ini:

Kode	IKU	V/C	Target Desember	Target Q4	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas Desember	Indeks Tanpa Batas Q4	Indeks Max. 31 Desember	Indeks Max. Q4	Indeks Max. 2024	Keterangan
Stakeholder Perspective(30%)			30%								111.83%	111.83%	111.83%	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi										111.83%	111.83%	111.83%	
1a-CP	Indeks Integritas	P/M	89.17	89.17	89.17	92.44	19.00%	57.58%	103.67%	103.67%	103.67%	103.67%	103.67%	hijau
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	P/M	43,35M	43,35M	43,35M	101.48M	14.00%	42.42%	123.16%	123.16%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
Customer Perspective(20%)			20.00%								119.73%	119.73%	119.73%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa										119.46%	119.46%	119.46%	
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/M	100.00%	100.00%	100.00%	118.37%	14.00%	40.43%	118.37%	118.37%	118.37%	118.37%	118.37%	hijau
2a1-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	P/L	71.65%	71.65%	71.65%	86.80%	14.00%	57.57%	121.14%	121.14%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
2a2-N	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	P/M	86.50%	86.50%	86.50%	100.00%	14.00%	42.42%	115.61%	115.61%	115.61%	115.61%	115.61%	hijau
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	P/M	747,45M	747,45M	747,45M	966,53M	14.00%	29.79%	132.57%	132.57%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	P/M	12,59M	12,59M	12,59M	15,706M	14.00%	29.79%	124.75%	124.75%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien										120.00%	120.00%	120.00%	hijau
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	E/M	75	75	75	0.00	14.00%	100.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
Internal Process Perspective (25%)			25.00%								120.00%	120.00%	120.00%	
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif										120.00%	120.00%	120.00%	hijau
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan (Sesuai Target Kriteria)	P/L	100.00%	100.00%	100.00%	132.86%	14.00%	50.00%	132.86%	132.86%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/M	100.00%	100.00%	100.00%	127.78%	14.00%	50.00%	127.78%	127.78%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
5	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif										120.00%	120.00%	120.00%	
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	73.00%	73.00%	73.00%	3.17%	14.00%	50.00%	195.65%	195.65%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
5b-CP	Persentase produktifitas lelang	P/M	89.00%	89.00%	89.00%	120.00%	14.00%	50.00%	134.83%	134.83%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional										120.00%	120.00%	120.00%	
6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	16.00%	16.00%	16.00%	0.02%	14.00%	100.00%	199.90%	199.90%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
Learning & Growth Perspective (25%)			25.00%								117.83%	117.83%	117.83%	
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif										118.83%	118.83%	118.83%	
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	P/M	85	85	85	99.02	14.00%	33.33%	116.50%	116.50%	116.50%	116.50%	116.50%	hijau
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%	14.00%	33.33%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	P/M	75.00%	75.00%	75.00%	103.08%	14.00%	33.33%	137.44%	137.44%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel										120.00%	120.00%	120.00%	
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%	14.00%	50.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	merah
8b-N	Persentase Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	P/M	15.00%	15.00%	15.00%	0.00%	14.00%	50.00%	200.00%	200.00%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
9	Komunikasi Publik yang efektif										120.00%	120.00%	120.00%	
9a-CP	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	P/M	3.55%	3.55%	3.55%	5.23%	14.00%	50.00%	147.32%	147.32%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80.00%	80.00%	80.00%	100.00%	14.00%	50.00%	125.00%	125.00%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
10	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah										112.50%	112.50%	112.50%	hijau
10a-CP	Indeks efektifitas UKI	P/M	82.00%	82.00%	82.00%	99.02%	14.00%	50.00%	120.76%	120.76%	120.00%	120.00%	120.00%	hijau
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/L	100.00%	100.00%	100.00%	105.00%	14.00%	50.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	105.00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)											116.95%	116.95%	116.95%	hijau



Dalam kurun 5 tahun terakhir (2020-2024) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) secara konsisten mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan penguatan rencana strategis yang diterapkan antara lain berupa perbaikan database sehingga keputusan strategis yang diambil tepat sasaran. Selain itu telah dilaksanakan juga penggalian potensi di semua IKU yang ada serta mengoptimalkan SDM dan sumber daya yang ada. Pada tahun 2024 Kanwil Ditjen Kekayaan Negara memperoleh penghargaan dari Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai salah satu dari tiga unit kerja di lingkup Ditjen Kekayaan Negara yang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi dan Manajemen Kinerja terbaik Tahun 2024.



Untuk beberapa data target dan realisasi capaian dari Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Bidang Lelang dan Bidang Piutang Negara dari tahun 2021 sampai dengan 2024 pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, dapat disajikan sebagai berikut:

1. PNBPN BMN

Tahun	Target (Rupiah)	Delta Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Delta Realisasi (%)	% Realisasi dari Target
2021	13,350,000,000.00	-	28,041,941,569.00	-	210.0%
2022	15,000,000,000.00	12.3%	56,333,428,408.00	100.9%	375.6%
2023	25,500,000,000.00	70.0%	42,601,134,638.00	-24.4%	167.1%
2024	26,775,000,000.00	5.0%	33,843,307,889.00	-20.6%	126.4%



Terjadi booming PNBP Aset pada tahun 2022, akibat berakhirnya pandemi Covid 19 sehingga proses yang belum terselesaikan ditahun 2020 dan 2021 diselesaikan pada tahun 2022.

2. Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN)

Tahun	Target (NUP)	Delta Target (%)	Realisasi (NUP)	Delta Realisasi (%)	% Realisasi dari Target
2021	2,112	-	2,284	-	108.1%
2022	1,089	-48.4%	1,242	-45.6%	114.0%
2023	522	-52.1%	925	-25.5%	117.2%
2024	353	-32.4%	449	-51.5%	127.2%

Target terkait sertifikasi BMN berupa tanah secara normal memang akan mengalami penurunan sejalan dengan jumlah NUP BMN berupa tanah yang cenderung mengalami kenaikan yang tidak signifikan bahkan tetap ataupun berkurang akibat adanya kegiatan hibah antara pemerintah pusat ke daerah.

Berdasarkan data Direktorat Perumus Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Negara (PKKN) untuk lingkup Kanwil DJKN KST hingga tahun 2024 telah berhasil menyelesaikan 87,19% dari seluruh NUP BMN atau 76,28% dari seluruh luasan BMN di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, sehingga menyisakan 428 NUP yang memiliki Tingkat kesulitan yang semakin meningkat karena berbagai permasalahan (legalitas ataupun penguasaan fisik) yang melekat pada tiap BMN berupa tanah (sesuai data per 31 Januari 2025 pukul 18.00 WIB).

3. PNBP Lelang

Tahun	Target (Rupiah)	Delta Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Delta Realisasi (%)	% Realisasi dari Target
2021	8,878,000,000.00	-	6,868,193,612.00	-	77.4%
2022	7,800,000,000.00	-12.1%	8,888,940,962.00	29.4%	114.0%
2023	8,277,000,000.00	6.1%	10,623,642,058.00	19.5%	128.4%
2024	16,508,900,000.00	99.4%	23,146,918,039.00	117.9%	140.2%

Kenaikan dari PNBP Lelang seiring dengan kenaikan dari kinerja Lelang meski ditahun 2021 target tidak tercapai akibat pandemi covid 19, namun mulai tahun 2022 PNBP Lelang mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi pada tahun 2024, dengan target yang meningkat hampir 100% dari tahun 2023, namun realisasi nya mengalami kenaikan nyaris sebesar 118% dari realisasi tahun 2023, dan dengan capaian realisasi menyampai 140,2%



dari target tahun 2024. Kenaikan yang signifikan menggambarkan terjadinya booming Lelang di tahun 2024.

4. Pokok Lelang

Tahun	Target (Rupiah)	Delta Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Delta Realisasi (%)	% Realisasi dari Target
2021	350,000,000,000.00	-	369,022,228,029.00	-	105.4%
2022	354,000,000,000.00	1.1%	377,363,606,251.00	2.3%	106.6%
2023	377,500,000,000.00	6.5%	458,438,263,617.00	21.5%	121.4%
2024	747,451,400,000.00	98.0%	990,924,641,321.00	116.2%	132.6%

Target Pokok Lelang dan realisasi mulai tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan adalah pada tahun 2024, dengan kenaikan target sebesar 98% terjadi juga kenaikan realisasi sebesar 116,2 % dari target dan realisasi tahun 2023. Sementara pada tahun 2023 dan tahun 2024 terjadi kenaikan tingkat capaian realisasi dibanding target yang sangat signifikan, dan tertinggi di tahun 2024 sebesar 132,6%. Capaian realisasi yang luarbiasa menandakan terjadinya booming Lelang di tahun 2024.

5. PNBP Piutang Negara

Tahun	Target (Rupiah)	Delta Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Delta Realisasi (%)	% Realisasi dari Target
2021	139,810,169.00	-	166,725,662.76	-	119.3%
2022	85,395,500.00	-38.9%	113,986,506.91	-31.6%	133.5%
2023	91,856,559.00	7.6%	100,496,723.00	-11.8%	109.4%
2024	63,300,000.00	-31.1%	135,160,053.00	34.5%	213.5%

Pada tahun 2024 terjadi mutasi penambahan penyerahan piutang dari pemerintah daerah dan berlanjutnya kebijakan crash program piutang negara, sehingga terjadi kenaikan signifikan terhadap realisasi PNBP Piutang Negara dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 34.5%. Selain itu, Tingkat realisasi terhadap target juga sangat tinggi yaitu sebesar 213,5% akibat penurunan target di tahun 2024 sebesar 31,1% akibat posisi outstanding piutang negara di akhir Tahun 2023 yang mengalami penurunan.

6. Penurunan Outstanding Piutang Negara atau Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS)

Tahun	Target (Rupiah)	Delta Target (%)	Realisasi (Rupiah)	Delta Realisasi (%)	% Realisasi dari Target
2021	17,960,193,043.00	-	49,703,063,473.17	-	276.7%
2022	9,489,141,740.00	-47.2%	9,783,795,689.00	-80.3%	103.1%
2023	12,593,741,234.00	32.7%	14,366,940,561.33	46.8%	114.1%
2024	12,589,200,000.00	-0.04%	15,705,569,000.00	9.3%	124.8%



7. Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Tahun	Target (BKPN)	Delta Target (%)	Realisasi (BKPN)	Delta Realisasi (%)	% Realisasi dari Target
2021	105	-	119	-	113.3%
2022	33	-68.6%	53	-55.5%	160.6%
2023	70	112.1%	85	60.4%	121.4%
2024	34	-51,4%	122	43,53	358,2%

* pada tahun 2024 terdapat perubahan manual iku yang mengikutsertakan pembobotan perhitungan penambahan BKPN baru

Dari table-table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi terhadap target nominal atau NUP ataupun BKPN selalu melebihi dari target yang ditetapkan sejak tahun 2022.

Adapun capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Integritas

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10	20	20	30	69.447	89,17	89,17	Max/TLK
Realisasi	10	20	20	42	42	42		
Capaian	100	100	100	100	84.47	84.47		
Nilai Kinerja	100	100	100	120	47.10	103.67	103.67	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89.17		92		-	92.44 (103.67%)
2023	88.67	91.5	91.5	91	-	89.17(100.56%)
2022		91	91	91	-	
2021		90.5	90.5	90.5	-	
2020		90	90		-	

Terjadi proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Seluruh unit kerja secara terus menerus menindaklanjuti upaya-upaya perbaikan bersama sebagaimana yang telah disampaikan pada Nota Dinas nomor ND-1180/KN.1/2024 tanggal 31 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) DJKN Tahun 2023.
2. Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-44/SJ.5/2024 hal Penyesuaian *Trajectory Target* Indikator Kinerja Tahun 2024

Implikasi:

Dimensi komponen penilaian meliputi:

1. Internal: Perdagangan pengaruh, Pengelolaan PBj, Pengelolaan anggaran, Pengelolaan SDM, Integritas dan pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi dan transparansi
2. Eksterna: upaya pencegahan korupsi, transparansi & keadilan layanan serta integritas pegawai.

Akar masalah:

1. Indeks SPI DJKN 2023 sebesar 84,79 (turun 6.09 poin dibanding tahun sebelumnya 90,88);
2. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan DJKN masih belum dirasakan secara optimal dari sudut pandang pihak eksternal;
3. Semakin rendah angka indeks menunjukkan tingkat risiko keterjadian korupsi semakin tinggi.



Tindakan yang Telah Dilaksanakan

1. Terkait capaian triwulan I, DJKN telah menyampaikan matriks action plan hasil SPI 2023 kepada Inspektur VII melalui Nota Dinas nomor ND-1173/KN.1/2024 hal Penyampaian Rencana Aksi dan Progress Tindak Lanjut Hasil SPI DJKN Tahun 2023 Periode Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 28 Maret 2024;
2. Untuk capaian triwulan II, DJKN juga telah menyampaikan data responden internal, eksternal dan ekspert serta data dukung SPI DJKN tahun 2024 kepada Inspektorat Bidang Investigasi melalui Nota Dinas nomor ND-2057/KN.1/2024 tanggal 21 Juni 2024;
3. Untuk Triwulan III DJKN telah melakukan pemenuhan dokumen sesuai petunjuk pada Nota dinas nomor: ND- 3130/KN.1/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Parameter Pengukuran Capaian IKU Indeks Integritas Triwulan III Tahun 2024.

Rekomendasi Rencana Aksi:

1. Sosialisasi kepada pihak internal dan eksternal DJKN
2. Kegiatan *integrity sharing* berupa dialog secara formal/informal yang dilaksanakan oleh Kepala Unit Kerja kepada pejabat structural dan/atau pejabat fungsional setara 1 s.d. 2 tingkat di bawahnya
3. Melakukan survei terhadap responden internal dan eksternal
4. Amplifikasi konten media sosial berupa konten terkait "Tolak dan Laporkan Gratifikasi" dan Saluran Pengaduan WISE pada seluruh saluran komunikasi yang dimiliki oleh unit kerja.

2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	Nov	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	320%	132,37%	132,37%	122,92%	126,98	131,79	131,79	
Capaian	120	120	120	120	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.



Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	43.35 M	100%	100%	100%	-	101.48M (120%)
2023	33.86M	100%	100%	100%	-	54.25M(120%)
2022	22.88M	100%	100%	100%	-	65.36M(120%)
2021	22,36M	100%	100%	100%	-	35.07M(156.82%)
2020	37.92M	100%	100%	100%	-	40.08M(105.72%)

Terjadi proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Kesadaran dari Satuan Kerja dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMN masih kurang.
2. Minat pelaku usaha untuk memanfaatkan BMN dalam usaha bisnisnya belum optimal.
3. Penyerahan piutang negara baru belum maksimal
4. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.
5. Lelang HT seringkali dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi.
6. Mendorong UMKM agar memasarkan lelang melalui *platform* lelang.go.id

Implikasi:

1. Kurangnya kesadaran Satuan Kerja dan juga minat dari pelaku usaha dalam pemanfaatan BMN
2. Peran aktif K/L dalam penyelesaian piutang negara
3. PUPN dapat mengambil tindakan keperdataan dalam pengurusan piutang negara
4. Percepatan penyelesaian piutang pemda
5. Potensi penerimaan negara dari debitur yang memanfaatkan crash program
6. Potensi lelang laku rendah akibatnya target PNPB Lelang tidak tercapai.



Akar masalah:

1. KPKNL di unit Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berada di wilayah kabupaten dimana Satuan Kerjanya relatif tidak memiliki BMN yang potensial untuk dapat dilakukan pemanfaatan.
2. Sumber penerimaan biad PPN, diperoleh dari BKN lama yang rutin melakukan angsuran
3. Kendala melakukan penagihan atas piutang tanpa jaminan
4. Masa pemulihan kondisi pandemi Covid-19.
5. Intensitas pengajuan permohonan lelang menurun khususnya dari perbankan disebabkan karena adanya relaksasi yang dilakukan oleh perbankan nasional terhadap debiturnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan, Bulan Januari 2024 melalui ND-247/WKN.12/2024, Bulan Februari 2024 melalui ND-370/WKN.12/2024, Bulan Maret melalui ND-495/WKN.12/2024, Bulan April melalui ND-324/WKN.12/2024, Bulan Mei melalui ND-702/WKN.12/2024, Bulan Juni melalui ND-816/WKN.12/2024, Bulan Juli melalui ND-1014/WKN.12/2024, Bulan Agustus melalui ND-1129/WKN.12/2024
2. Melakukan kegiatan Bincang Aset pada tanggal 20 Februari 2024 (UND-35/WKN.12/2024), 27 Maret 2024 (UND-64/WKN.12/2024), 25 April 2024 (UND-80/WKN.12/2024), 30 Mei 2024 (UND-109/WKN.12/2024), 28 Juni 2024 (UND-169/WKN.12/2024), 31 Juli 2024 (UND-194/WKN.12/2024), 23 Agustus 2024 (UND-209/WKN.12/2024, 12 September 2024 (UND-228/WKN.12/2024, 28 Oktober 2024 (UND-261/WKN.12/2024)
3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja piutang negara sampai dengan September 2024 melalui kegiatan Kupas Piutang Negara
4. Melakukan Kegiatan Temu Wicara guna menggali isu yang terjadi pada penyerah piutang
5. Pelaksanaan pembinaan ke KPKNL Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan Banjarmasin.

Rekomendasi dan Rencana Aksi:

1. Melakukan monitoring & evaluasi secara teratur per bulan.
2. Melakukan koordinasi dengan Korwil di lingkungan Kalimantan Selatan dan Tengah melalui kegiatan Bincang Aset, Kupas PN
3. Mendorong KPKNL agar melaksanakan penggalan potensi lelang;
4. Melakukan pembinaan ke KPKNL cq. Pelelang dan ke Pejabat Lelang Kelas II;

IKU ini terdiri atas 3 penerimaan negara yang dijelaskan lebih terperinci sebagaimana penjelasan dibawah ini:



a. PNPB Aset

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	Rp5.145.000.000	Rp11.602.500.000	Rp11.602.500.000	Rp18.401.250.000	Rp21.192.500.000	Rp26.775.000.000	Rp26.775.000.000	Max/TLK
Realisasi	Rp7.136.592.481	Rp16.038.915.413	Rp16.038.915.413	Rp21.548.172.252	Rp30.111.428.405,00	Rp32.883.525.781	Rp32.883.525.781	
Capaian	26,65%	59,90%	59,90%	80,48%	125,55%	122,81%	122,81%	
Capaian Kinerja	128,44%	144,92%	144,92%	122,18%	121,77%	126,40%	126,40%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Isu Utama:

1. Kesadaran dari Satuan Kerja dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMN masih kurang.
2. Minat pelaku usaha untuk memanfaatkan BMN dalam usaha bisnisnya belum optimal.

Implikasi:

Dengan kurangnya kesadaran Satuan Kerja dan juga minat dari pelaku usaha dalam pemanfaatan BMN mengakibatkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan BMN belum sepenuhnya optimal. Padahal jika BMN dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien, dapat membantu mengembangkan perekonomian bagi pelaku usaha maupun negara.

Akar Masalah:

KPKNL di unit Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berada di wilayah kabupaten dimana Satuan Kerjanya relatif tidak memiliki BMN yang potensial untuk dapat dilakukan pemanfaatan.

Tindakan yang dilaksanakan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan, Bulan Januari 2024 melalui ND-247/WKN.12/2024, Bulan Februari 2024 melalui ND-370/WKN.12/2024, Bulan Maret melalui ND-495/WKN.12/2024, Bulan April melalui ND-324/WKN.12/2024, Bulan Mei melalui ND-702/WKN.12/2024, Bulan Juni melalui ND-816/WKN.12/2024, Bulan Juli melalui ND-1014/WKN.12/2024, Bulan Agustus melalui ND-1129/WKN.12/2024, Bulan September melalui ND-1280/WKN.12/2024, Bulan Oktober melalui ND-1418/WKN.12/2024, Bulan November 2024 melalui ND-1524/WKN.12/2024.



2. Melakukan kegiatan Bincang Aset pada tanggal 20 Februari 2024 (UND-35/WKN.12/2024), 27 Maret 2024 (UND-64/WKN.12/2024), 25 April 2024 (UND-80/WKN.12/2024), 30 Mei 2024 (UND-109/WKN.12/2024), 28 Juni 2024 (UND-169/WKN.12/2024), 31 Juli 2024 (UND-194/WKN.12/2024), 23 Agustus 2024 (UND-209/WKN.12/2024), 12 September 2024 (UND-228/WKN.12/2024), 28 Oktober 2024 (UND-261/WKN.12/2024).\
3. Melakukan kegiatan Lab Aset 4 September 2024 (UND-220/WKN.12/2024), 31 Oktober 2024 (UND-269/WKN.12/2024), 21 November 2024 (UND-287/WKN.12/2024), 18 Desember 2024 (UND-310/WKN.12/2024).

Rekomendasi dan Rencana Aksi:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian.
2. Melakukan koordinasi dengan Korwil di lingkungan Kalimantan Selatan dan Tengah melalui kegiatan Bincang Aset.

b. PNPB Piutang Negara

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	21%	49%	50%	87%	92.94%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	38,52%	68,64%	110%	115,27%	146,97	213,52%	213,52%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian Kinerja	182.17%	223.99%	223.99%	132.51%	170.32%	213.52%	213.52%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Isu Utama:

1. Debitur yang rutin mengangsur masih terbatas;
2. Debitur yang mengangsur tidak memiliki barang jaminan;
3. Pelaksanaan crash program berdasarkan PMK;
4. PUPN memiliki kewenangan pencegahan dan Tindakan keperdataan;
5. Adendum berdampak pada capaian IKU Tahunan.

Implikasi:

1. IKU PNPB piutang negara bergantung pada angsuran beberapa debitur;
2. Tidak ada aset yang dapat dieksekusi apabila debitur berhenti mengangsur;



3. IKU Crash Program (CP) Piutang Negara sudah ditetapkan awal tahun, tetapi pelaksanaannya menunggu PMK;
4. PUPN dapat memaksa debitur tanpa jaminan melunasi melalui ancaman pencegahan/pembatasan hak keperdataan;
5. Adendum menyebabkan sulitnya meraih capaian IKU 120%.

Akar Masalah:

1. Penyerah piutang potensial kurang proaktif dalam mengelola piutang macet untuk diserahkan ke PUPN;
2. Terdapat debitur yang memiliki latar belakang ekonomi kurang mampu sehingga kemampuan membayar angsuran tidak ada;
3. Beberapa debitur tidak memiliki barang jaminan;
4. Sedikitnya BKN yang dikelola KPNL menjadi tantangan penyelesaian BKN

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Pembinaan piutang negara dengan focus pembahasan penuntasan target;
2. Membuat diagram pohon permasalahan piutang negara sehingga terdapat Gambaran jelas akar masalah;
3. Pemberitahuan kepada debitur potensial saat PMK Crash Program PPN telah terbit;
4. Pemetaan BKN untuk mencapai IKU lebih dari 100%

Rekomendasi Rencana Aksi:

1. Meningkatkan intensitas penggalan potensi piutang negara terutama kepada BPKAD selaku PPKD pemda untuk menyerahkan piutang macet
2. Berkomunikasi dengan BPK dan APIP pemda agar mendorong temuan piutang macet untuk diserahkan ke PUPN
3. Mengimplementasikan Tindakan keperdataan untuk mendorong debitur mampu mengangsur/melunasi

c. PNB Lelang

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	8.692.000.000	11.879.000.000	11.879.000.000	14.662.800.000	15.893.533.333	16.508.900.000	16.508.900.000	Max/TLK
Realisasi	11.950.580.492	13.379.743.501	13.379.743.501	19.089.235.498	21.894.069.809	23.156.918.039	23.156.918.039	
Capaian	137,49%	112,63%	112,63%	130,19%	132.62%	140.21%	140.21%	
Capaian Kinerja	1374.89%	126.45%	126.45%	130.36%	137.75%	140.21%	140.21%	



Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Isu Utama:

1. Mewujudkan tercapainya target PNBP Lelang.
2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.
3. Lelang HT seringkali dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi.
4. Mendorong UMKM agar memasarkan lelang melalui *platform* lelang.go.id

Implikasi:

Potensi lelang laku rendah akibatnya target PNBP Lelang tidak tercapai.

Akar Masalah:

1. Masa pemulihan kondisi pandemi Covid-19.
2. Intensitas pengajuan permohonan lelang menurun khususnya dari perbankan disebabkan karena adanya relaksasi yang dilakukan oleh perbankan nasional terhadap debiturnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melaksanakan pembinaan ke KPKNL Palangkaraya, KPKNL Pangkalanbun dan KPKNL Banjarmasin.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin selama triwulan III pada tahun 2024

Rekomendasi Rencana Aksi:

1. Mendorong KPKNL agar melaksanakan penggalan potensi lelang;
2. Melakukan pembinaan ke KPKNL cq. Pelelang dan ke Pejabat Lelang Kelas II;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan;

3. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30%	50%	50%	60%	67,66%	71,5%	71,5%	Max/TLK
Realisasi	94,93%	94,57%	93,70	87,57%	86.72%	86,80%	86,80%	
Capaian	94,93%	94,57%	93,70	87,57%	86.72%	86,80%	86,80%	
Capaian Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	



Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	71.65%	70%	70%	70%	-	101.48M (120%)
2023	68%	65%	65%	65%	-	82.19%(120.87%)
2022	65%	60%	60%	60%	-	78.60%(120%)
2021	62%	57%	57%	57%	-	78.95%(127.34%)
2020	55%	55%	55%	55%	-	74.90%(120%)

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Capaian hasil perhitungan kesesuaian SBSK belum dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya.
2. Kurangnya pemahaman Satuan Kerja dalam penggolongan jenis BMN misalnya tanah yang dimiliki oleh Satuan Kerja merupakan tanah kosong namun diidentifikasi oleh Satuan Kerja sebagai Tanah Bangunan Kantor.

Implikasi:

Dengan adanya kesalahan dalam mengidentifikasi jenis BMN, mengakibatkan hasil perhitungan SBSK belum sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Akar Masalah:

Tingkat Pemahaman satker terkait kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK masih kurang.



Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan, Bulan Januari 2024 melalui ND-247/WKN.12/2024, Bulan Februari 2024 melalui ND-370/WKN.12/2024, Bulan Maret melalui ND-495/WKN.12/2024, Bulan April melalui ND-324/WKN.12/2024, Bulan Mei melalui ND-702/WKN.12/2024. Bulan Juni melalui ND-816/WKN.12/2024, Bulan Juli melalui ND-1014/WKN.12/2024, Bulan Agustus melalui ND-1129/WKN.12/2024, Bulan September melalui ND-1280/WKN.12/2024, Bulan Oktober melalui ND-1418/WKN.12/2024.
2. Melakukan kegiatan Bincang Aset pada tanggal 20 Februari 2024 (UND-35/WKN.12/2024), 27 Maret 2024 (UND-64/WKN.12/2024), 30 Mei 2024 (UND-109/WKN.12/2024), 25 April 2024 (UND-80/WKN.12/2024), 30 Mei 2024 (UND-109/WKN.12/2024), 28 Juni 2024 (UND-169/WKN.12/2024), 31 Juli 2024 (UND-194/WKN.12/2024), 23 Agustus 2024 (UND-209/WKN.12/2024), 12 September 2024 (UND-228/WKN.12/2024, 28 Oktober 2024 (UND-261/WKN.12/2024).
3. Melakukan kegiatan Lab Aset 4 September 2024 (UND-220/WKN.12/2024), 31 Oktober 2024 (UND-269/WKN.12/2024), 21 November 2024 (UND-287/WKN.12/2024), 18 Desember 2024 (UND-310/WKN.12/2024).

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur se- tiap bulan untuk memantau perkembangan capaian.
2. Melakukan koordinasi dengan Korwil di lingkungan Kalimantan Selatan dan Tengah melalui kegiatan Bincang Aset.

4. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	45%	45%	60%	77.66%	86,5%	86,5%	Max/TLK
Realisasi	85 TL dari 210 persetujuan	194 TL dari 245 persetujuan	227 TL dari 270 persetujuan	264 TL dari 280 persetujuan	270 TL dari 280 persetujuan	279 TL dari 279 persetujuan	279 TL dari 279 persetujuan	
Capaian	40,48%	79,18%	84,07%	94,29%	96,43%	100%	100%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.



Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	86.50%	-	80%	-	-	100% (115,61%)
2023	86%	-	80%	80%	-	97%(120%)
2022	85%	-	75%	80%	-	110%(117.65%)
2021	85%	-	75%	80%	-	97.43%(114.62%)
2020	80%	-	70%	-	-	87.26%(109.08%)

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

Terdapat satuan kerja yang belum dapat menindaklanjuti persetujuan, khususnya pemanfaatan.

Implikasi:

Jika ada persetujuan yang tidak ditindaklanjuti oleh satuan kerja, maka penerimaan negara bukan pajak tidak akan optimal.

Akar Masalah:

Adanya persetujuan yang tidak ditindaklanjuti, misalnya karena mitra berubah pikiran atau pun tidak ada penawaran pada pelaksanaan Lelang.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara
2. secara bulanan, pada :
3. Bulan Januari 2024 melalui nota dinas nomor ND-247/WKN.12/2024
4. Bulan Februari 2024 melalui ND-370/WKN.12/2024
5. Bulan Maret melalui ND-495/WKN.12/2024, bulan April melalui ND-324/WKN.12/2024.
6. Bulan Mei melalui ND-702/WKN.12/2024, bulan Juni melalui ND-816/WKN.12/2024.
7. Bulan Juli melalui ND-1014/WKN.12/2024, bulan Agustus melalui ND-1129/WKN.12/2024.
8. Bulan September melalui ND-1280/WKN.12/2024, bulan Oktober melalui ND-1418/WKN.12/2024



9. Bulan November 2024 melalui ND-1524/WKN.12/2024.

Rekomendasi Rencana Aksi:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian.
2. Melakukan koordinasi dengan Korwil di lingkungan Kalimantan Selatan dan Tengah melalui kegiatan Bincang Aset.

5. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	39.641.300.000	409.809.750.000	409.809.750.000	508.871.700.000	662.981.633.333	747.451.400.000	747.451.400.000	Max/TLK
Realisasi	348.307.370.956	428.402.123.498	516.144.976.008	746.898.901.700	121.36%	132.53%	132.53%	
Capaian	876,65%	104.54%	125,95%	146,78%	907.094.581.408	990.632.124.121	990.632.124.121	
Capaian Kinerja	120%	146.88%	146.88%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Persentase Realisasi Pokok Lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	747,45M	-	100%			966,53M(120%)
2023	377,5M	-	100%	100%		458,43M(121,44%)
2022	354M	-	100%	100%		377,36M(106,60%)
2021	350M	-	100%	100%		369,02M(105,43%)
2020	462,62M	-	100%	100%		536,48M(115,95%)

Terjadi proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.



Isu Utama:

1. Mewujudkan tercapainya target Pokok Lelang.
2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19
3. Lelang HT seringkali dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi.
4. Mendorong UMKM agar memasarkan lelang melalui *platform* lelang.go.id

Implikasi:

Penerimaan hasil lelang rendah akibatnya target pokok lelang tidak tercapai.

Akar Masalah:

1. Masa pemulihan kondisi pandemi Covid-19.
2. Intensitas pengajuan permohonan lelang menurun khususnya dari perbankan disebabkan karena adanya relaksasi yang dilakukan oleh perbankan nasional terhadap debiturnya.

Tindakan yang pernah dilaksanakan:

1. Melaksanakan pembinaan ke KPKNL Palangkaraya, Pangkalanbun dan Banjarmasin.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin selama triwulan II pada tahun 2024

Rekomendasi rencana aksi:

1. Mendorong KPKNL agar melaksanakan penggalan potensi lelang;
2. Melakukan pembinaan ke KPKNL cq. Pelelang dan ke Pejabat Lelang Kelas II;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan;

6. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	16%	35%	35%	87%	83,96%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	9,18%	38,52%	45,57%	169,36%	187,88%	124,75%	124,75%	
Capaian	57,38%	110,62%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian Kinerja	64.04%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.



Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	12,59M	-	-	-	-	15,706M(120%)
2023	12.59M	-	-	100	-	14.43M(114.59%)
2022	9.48M	-	-	-	-	9.78M(103.11%)
2021	17.96M	-	-	-	-	49.703M(276.74%)
2020	3.34M	-	-	-	-	20.23M(604.84%)

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Penurunan Outstanding dari Angsuran Sulit Menutup target Penurunan *Outstanding*
2. Debitur tidak memiliki barang jaminan
3. Pelaksanaan *Crash Program* berdasarkan PMK
4. PUPN memiliki kewenangan pencegahan dan Tindakan keperdataan
5. Adendum berdampak pada capaian IKU Tahunan

Implikasi:

1. Jumlah BKPN yang dikelola sedikit dengan gap nilai BKPN cukup besar
2. Target CP sudah ditetapkan sejak awal tahun tetapi KPKNL tidak bisa eksekusi karena menunggu dasar pelaksanaan CP
3. PUPN dapat memaksa debitur tanpa jaminan melunasi melalui ancaman pencegahan/tind.perdata
4. Adendum menyebabkan sulitnya meraih capaian IKU 120%

Akar Masalah:

1. Penyerah piutang potensial kurang proaktif dalam mengelola piutang macet untuk diserahkan ke PUPN



2. Melihat jumlah BKPN yang dikelola, target tahunan cukup tinggi, sehingga pilihan penuntasan terbatas
3. Sampai saat ini, pelaksanaan CP menggunakan PMK yang diterbitkan setiap tahun
4. Sedikitnya BKPN yang dikelola KPKNL menjadi tantangan penyelesaian BKPN

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Pembinaan piutang negara dengan focus pembahasan penuntasan target
2. Membuat diagram pohon permasalahan piutang negara sehingga terdapat Gambaran jelas akar masalah
3. Pemberitahuan kepada debitur potensial saat PMK CP telah terbit
4. Pemetaan BKPN untuk mencapai IKU lebih dari 100%

Rekomendasi rencana aksi:

1. Meningkatkan intensitas penggalan potensi piutang negara terutama kepada BPKAD selaku PPKD pemda;
2. Berkomunikasi dengan BPK dan APIP pemda agar mendorong temuan piutang macet untuk diserahkan ke PUPN;
3. Meningkatkan tahapan pengurusan piutang negara ke tahap optimal.

7. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/TLK
Realisasi	104,91	104.33	104.33	103,84	107.25	95.06	101.05	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	78	-	-	-	-	98.17(120%)
2023	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Ruang lingkup penilaian adalah Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam, kecuali permohonan penilaian yang memerlukan bantuan tenaga penilai dari unit lain;
2. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon;
3. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilai selesai dan disampaikan ke pemohon.

Implikasi:

Pada KPKNL dengan permohonan penilaian yang tinggi namun SDM dan anggaran yang kurang memadai dapat mempengaruhi capaian IKU.

Akar masalah:

Formula perhitungan capaian IKU yang dimulai dari surat/nota dinas masuk permohonan penilaian dan selesai saat laporan penilaian disampaikan kepada pemohon dapat menyebabkan capaian IKU yang kurang optimal pada KPKNL yang permohonan penilaiannya tinggi namun SDMnya kurang memadai.



Tindakan yang telah dilakukan:

1. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan memberikan bantuan tenaga penilai apabila dibutuhkan
2. Melakukan pemantauan capaian IKU melalui tautan yang disediakan oleh Kantor Pusat
3. Melakukan pemantauan capaian IKU yang kemudian disampaikan ke KPKNL tiap awal bulan

Rekomendasi rencana aksi:

1. Memberikan bantuan tenaga penilai kepada KPKNL ketika dibutuhkan
2. Melakukan pemantauan capaian IKU

8. Persentase barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	86.66%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	20%	106	163	342	467	469	469	
Capaian	20%	30,03%	46,18%	96,88%	132,29%	132,86%	132,86%	
Capaian Kinerja	100%	112.34%	112.34%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan (Sesuai Target Kriteria)

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	100%		-	132.86%(120%)
2023	100%	-	100%	100%	-	177.20%
2022	100%	-	100%	100%	-	114.05%
2021	100%	-	100%	-	-	108.14%
2020	100%	-	100%	-	-	153.18%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam

Halaman **42** dari **108**



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Bidang tanah yang menjadi target sertipikasi tidak sepenuhnya *clean and clear*.
2. Adanya perbedaan antara target dari Kanwil DJKN Kalselteng dengan Kanwil BPN Kalimantan Tengah dan Kanwil BPN Kalimantan Selatan.
3. Perbedaan konsep program pensertipikatan BMN berupa tanah sejak tahun 2023.

Implikasi:

1. Potensi tidak tersertifikasinya seluruh BMN berupa tanah
2. Ketidaksesuaian realisasi anggaran sertipikasi BMN

Akar Masalah:

1. Hasil verifikasi bidang tanah yang ditetapkan sebagai target masih terdapat bidang tanah yang tidak *clean and clear*.
2. Terdapat perbedaan target dari Kanwil DJKN Kalselteng dengan Kanwil BPN Kalimantan Tengah dan Kanwil BPN Kalimantan Selatan.

Tindakan yang telah dilakukan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan, Bulan Januari 2024 melalui ND-247/WKN.12/2024, Bulan Februari 2024 melalui ND-370/WKN.12/2024, Bulan Maret melalui ND-495/WKN.12/2024, Bulan April melalui ND-324/WKN.12/2024, Bulan Mei melalui ND-702/WKN.12/2024, Bulan Juni melalui ND-816/WKN.12/2024, Bulan Juli melalui ND-1014/WKN.12/2024, Bulan Agustus melalui ND-1129/WKN.12/2024, Bulan September melalui ND-1280/WKN.12/2024, Bulan Oktober melalui ND-1418/WKN.12/2024..
2. Melakukan Pembahasan Daftar Nominatif Pensertipikatan BMN berupa Tanah Tahun 2024 wilayah Kalimantan Tengah (UND-11/WKN.12/2024), melakukan monitoring dan evaluasi sertipikasi BMN tahun 2024 wilayah Kabupaten Lamandau (UND-98/WKN.12/2024), melakukan monitoring dan evaluasi sertipikasi Prov. Kalteng di KPKNL Pangkalan Bun (ST-286/WKN.12/2024), melakukan monitoring dan evaluasi sertipikasi Prov. Kalteng di KPKNL Pangkalan Bun (ST-286/WKN.12/2024).
3. Melakukan Bincang Aset dengan tema monitoring sertipikasi tanggal 28 Oktober 2024 (UND-261/WKN.12/2024).
4. Melakukan kegiatan Lab Aset 4 September 2024 (UND-220/WKN.12/2024), 31 Oktober 2024 (UND-269/WKN.12/2024).



Rekomendasi rencana aksi:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian
2. Melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Kalimantan Selatan dan Kanwil BPN Kalimantan Tengah.

9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Kanwil DJKN Kaisel & Tengah	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	Komponen A = 31 NUP; Komponen B = 3 Paket	Komponen A = 97 NUP; Komponen B = 6 Paket	Komponen A = 97 NUP; Komponen B = 6 Paket	Komponen A = 246 NUP; Komponen B = 12 Paket	Komponen A = 306 NUP; Komponen B = 14 Paket	Komponen A = 306 NUP; Komponen B = 14 Paket	Komponen A = 306 NUP; Komponen B = 14 Paket	Max/TLK
Realisasi	Komponen A = 46 NUP; Komponen B = 0	Komponen A = 106 NUP; Komponen B = 8	Komponen A = 139 NUP; Komponen B = 12	Komponen A = 281 NUP; Komponen B = 17 Paket	Komponen A = 343 NUP; Komponen B = 18 Paket.	Komponen A = 374 NUP; Komponen B = 21 Paket.	Komponen A = 374 NUP; Komponen B = 21 Paket.	
Capaian	12,03%	53,48%	53,48%	97,75%	115,39%	120%	120%	

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	100%	-	-	127.78%(120%)
2023	100%	-	100%	-	-	136.11%
2022	100%	-	100%	-	-	130.27%(120%)
2021	100%	-	100%	-	-	118.75%
2020	100%	-	100%	-	-	117.53%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian



Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

BMN yang dijadikan target pada Portofolio Asset ditentukan sendiri oleh KPKNL.

Implikasi:

Tidak dapat mendorong satker/korwil target agar segera berkoordinasi dengan KPKNL untuk melaksanakan pengisian formulir pendataan portofolio aset karena target ditentukan.

Akar masalah:

Terkait target portofolio aset tidak ditentukan oleh Kantor Pusat, KPKNL bebas memilih target sendiri sepanjang sesuai dengan ketentuan.

Tindakan yang telah dilaksnakan:

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada Pengelolaan Kekayaan Negara secara bulanan, Bulan Januari 2024 melalui ND-247/WKN.12/2024, Bulan Februari 2024 melalui ND-370/WKN.12/2024, Bulan Maret melalui ND-495/WKN.12/2024, Bulan April melalui ND-324/WKN.12/2024, Bulan Mei melalui ND-702/WKN.12/2024, Bulan Juli melalui ND-1014/WKN.12/2024, Bulan Agustus melalui ND-1129/WKN.12/2024, , Bulan September melalui ND-1280/WKN.12/2024, Bulan Oktober melalui ND-1418/WKN.12/2024, Bulan November 2024 melalui ND-1524/WKN.12/2024.

Rekomendasi rencana aksi:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur setiap bulan untuk memantau perkembangan capaian.
2. Melakukan koordinasi dengan Korwil di lingkungan Kalimantan Selatan dan Tengah melalui kegiatan Bincang Aset.

10. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	97%	90%	90%	81%	76%	71%	71%	MIN/TLK
Realisasi	92,86%	88,89%	84,13	76,98%	73,81%	195,65%	195,65%	
Capaian	104,45%	107,69%	106,53%	104,96%	106,17%	120%	120%	
Capaian Kinerja	105.09%	107.41%	107.41%	104.96%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.



Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	73%	-	100%			3.17%(120%)
2023	100%	-	100%	100%	-	122.86%(120%)
2022	100%	-	100%	100%	-	120%
2021	100%	-	100%	100%	-	113.33%
2020	100%	-	100%	100%	-	123.29%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Penurunan Outstanding dari Angsuran Sulit Menutup target Penurunan *Outstanding*
2. Debitur tidak memiliki barang jaminan
3. Pelaksanaan *Crash Program* berdasarkan PMK
4. PUPN memiliki kewenangan pencegahan dan Tindakan keperdataan
5. Adendum berdampak pada capaian IKU Tahunan

Implikasi:

1. Jumlah BKNP yang dikelola sedikit dengan gap nilai BKNP cukup besar
2. Target CP sudah ditetapkan sejak awal tahun tetapi KPNL tidak bisa eksekusi karena menunggu dasar pelaksanaan CP
3. PUPN dapat memaksa debitur tanpa jaminan melunasi melalui ancaman pencegahan/tind.perdata
4. Adendum menyebabkan sulitnya meraih capaian IKU 120%

Akar masalah:

1. Penyerah piutang potensial kurang proaktif dalam mengelola piutang macet untuk diserahkan ke PUPN
2. Sampai saat ini, pelaksanaan CP menggunakan PMK yang diterbitkan setiap tahun sehingga KPNL bergantung pada PMK tersebut sebagai dasar pelaksanaan
3. Beberapa debitur tidak memiliki barang jaminan
4. Sedikitnya BKNP yang dikelola KPNL menjadi tantangan penyelesaian BKNP



Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Pembinaan piutang negara dengan focus pembahasan penuntasan target Q2
2. Membuat diagram pohon permasalahan piutang negara sehingga terdapat Gambaran jelas akar masalah
3. Pemberitahuan kepada debitur potensial saat PMK CP telah terbit
4. Menetapkan deadline eksekusi realisasi target piutang negara
5. Memetakan debitur potensial pencegahan/tind.keperdataan

Rekomendasi rencana aksi:

1. Meningkatkan intensitas penggalan potensi piutang negara terutama kepada BPKAD selaku PPKD pemda
2. Berkomunikasi dengan BPK dan APIP pemda agar mendorong temuan piutang macet untuk diserahkan ke PUPN
3. Meningkatkan tahapan pengurusan piutang negara ke tahap optimal

11. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0.32%	0.02	0.02	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	16%		26%		-	0.02%(120%)
2023	25%		27%	27%	-	0.62%(197.50%)
2022	19%		28%	28%	-	1.38%(120%)
2021	22%		29%	29%	-	4.21%(120%)
2020	30%	30%	30%	30%	-	4.76%(184.13%)



Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan Persetujuan pengelolaan BMN.
2. Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
3. Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.
4. Nilai usulan besaran sewa yang diajukan oleh satuan kerja seringkali merupakan nilai perolehan BMN yang nilainya relatif lebih besar beberapa kali lipat jika dibandingkan dengan nilai sewa BMN.

Implikasi:

Terdapat deviasi yang cukup besar antara nilai usulan besaran sewa dan nilai hasil penilaian yang dihasilkan oleh Penilai Pemerintah

Akar masalah:

Kurangnya koordinasi antara Satuan Kerja Pemohon Sewa dengan Direktorat PKN yang menyebabkan satuan kerja mengajukan nilai perolehan BMN sebagai nilai usulan besaran sewa.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat PKN dan Satuan kerja Pemohon Sewa
2. Melakukan pemantauan capaian IKU melalui channel yang disediakan oleh Kantor Pusat
3. Melakukan pemantauan capaian IKU yang kemudian disampaikan ke KPKNL tiap awal bulan



Rekomendasi rencana aksi:

1. Melakukan monitoring berkala pada channel Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait capaian IKU

12. Persentase Produktivitas lelang

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30%	45%	45%	60%	79.33%	89%	89%	Max/TLK
Realisasi	68,61%	83,72%	83,07%	101,13%	120%	107,46 %	107,46 %	
Capaian	120%	120%	120%	113,63%	120%	179,10%	179,10%	
Capaian Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Persentase produktivitas lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89%	-	34%	-	-	120%(120%)
2023	80%	-	34%	-	-	105%(131.25%)
2022	36%	-	34%	-	-	47.34%(129%)
2021	35%	-	34%	-	-	51.25%(146.43%)
2020	34%	32	32%	32	-	52.85%(120%)

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Mewujudkan tercapainya target Produktifitas Lelang.



2. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19
3. Lelang HT seringkali dibatalkan oleh pemohon lelang dikarenakan adanya pelunasan ataupun restrukturisasi.
4. Mendorong UMKM agar memasarkan lelang melalui *platform* lelang.go.id

Implikasi:

Penerimaan hasil lelang rendah akibatnya target produktifitas lelang tidak tercapai.

Akar masalah:

1. Masa pemulihan kondisi pandemi Covid-19.
2. Intensitas pengajuan permohonan lelang menurun khususnya dari perbankan disebabkan karena adanya relaksasi yang dilakukan oleh perbankan nasional terhadap debiturnya.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan pendataan sertifikat diklat
2. Mengusulkan diklat secara *e-learning* dengan tema yang beragam sehingga pegawai berminat utk diklat secara *e-learning*
3. Membuat Undangan pelaksanaan *sharing knowledge* pegawai sesuai jadwal

Rekomendasi rencana aksi:

1. Memonitor Capaian realisasi iku setiap triwulan
2. Mengusulkan diklat secara *e-learning* dengan tema yang mengutamakan sesuai dengan tusinya.
3. Melakukan pendataan dan pengumpulan sertifikat diklat.

13. Persentase Penyelesaian program kerja duta transformasi

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengeloln Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Persentase Penyelesaian program kerja duta transformasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	5%	20%	20%	45%	65%	75%	75%	Max/TLK
Realisasi	5%	46,90%	46,90%	98.08%	103.08	120	120	
Capaian	100%	100%	100%	120%	120%	120%	120%	

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.



Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	75%	-	-	-	-	13.08%(120%)
2023		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

Dalam menjaga kesinambungan implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan serta Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 serta sebagai bentuk manajemen perubahan pada Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, maka dibentuklah Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2024 tanggal 27 April 2024.

Kick-Off Duta Transformasi 2024 telah diselenggarakan Rabu, 15 Mei 2024 pukul 13.00 s.d 15.00 WIB secara daring pada <https://s.id/DutaTransformasi>. Duta Transformasi pun harus mempersiapkan program kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 ini.

Implikasi:

Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2024 terdiri atas:

- Change Champion
- Change Agent
- Lighthouse Team.

Akar masalah:

1. Masih terdapat pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai mentalitas minta dilayani bukan melayani ;
2. Perlu dibangun kesadaran sebagai pelayan masyarakat antara lain dengan menjadikan pekerjaan adalah ibadah, bekerja kesempatan membantu orang lain, siapa menabur akan menuai hasilnya dan memiliki mentalitas melayani dengan hati.



Tindakan yang dilaksanakan:

Dalam penguatan budaya Kementerian Keuangan, *Lighthouse Team* sebagai Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2024 melaksanakan peran sebagai inisiator atau kolaborator dalam penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada penguatan budaya dan pelaksanaan sikap dasar dan pelaku efektif Kemenkeu berdasarkan KMK 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-15/MK.1/2022 tentang Panduan Pelaksanaan Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, hal tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi Pelayanan Prima pada tanggal 19 Juni 2024.

Rekomendasi rencana aksi:

Melaksanakan peran sebagai inisiator atau kolaborator dalam penyelenggaraan kegiatan yang berdampak pada penguatan budaya dan pelaksanaan sikap dasar dan pelaku efektif Kemenkeu pada unit masing-masing.

14. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	15%	40%	60%	75%	92%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	35,12%	49,76%	70.24	96,59%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	120%(120%)
2023	100%	-	-	-	-	120%(120%)
2022	100%	-	-	-	-	120%(120%)
2021	100%	-	-	-	-	120%
2020	100%	-	-	-	-	116.76%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor



245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu utama:

1. Sertifikat pelatihan berupa e-sertifikat yang dikirim langsung ke akun pegawai baik melalui HRIS maupun semantik.bppk.kemenkeu.go.id, pengelola kepegawaian tidak punya alat untuk memonitor sertifikat yang sudah diterima oleh pegawai.
2. Persentase untuk pengembangan kompetensi pegawai sudah melebihi target namun pegawai masih harus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Implikasi:

Walaupun realisasi IKU Q1 telah tercapai namun pegawai masih harus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akar masalah:

1. Ada pegawai yang tidak aktif untuk melaksanakan *e-learning open class* yang ditawarkan melalui klc2.kemenkeu.go.id dan <http://10.242.77.20/diklat>.
2. Kesulitan pencatatan/ pendataan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh pegawai.
3. Pelaksanaan *sharing knowledge* masih dilaksanakan guna memfasilitasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan pendataan sertifikat diklat
2. Mengusulkan diklat secara *e-learning* dengan tema yang beragam sehingga pegawai berminat utk diklat secara *e-learning*
3. Membuat Undangan pelaksanaan *sharing knowledge* pegawai sesuai jadwal

Rekomendasi rencana aksi:

1. Memonitor Capaian realisasi iku setiap triwulan
2. Mengusulkan diklat secara *e-learning* dengan tema yang mengutamakan sesuai dengan tugasnya.
3. Melakukan pendataan dan pengumpulan sertifikat diklat.



15. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	100	98.94	98.94	99.24	99.24	99,02	99,02	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	85	-	-	-	-	99.02(116.50%)
2023	80	-	-	-	-	98.82(123.53%)
2022	-	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Implikasi:

1. Implementasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022
2. Pelaporan dilakukan triwulanan, sedangkan pengukuran indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko dilakukan secara tahunan



Akar masalah:

1. Terjadi pergantian pegawai baru selaku Person In-Charge Kinerja Organisasi, sehingga diperlukan diklat untuk menunjang pelaksanaan tugas;
2. IKU ini terdiri dari 3 komponen, IKU kualitas Manajemen Kinerja Organisasi, IKU Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai dan IKU Kualitas Manajemen Risiko. Apabila hasil revidi dari salah satu komponen belum bisa diterima pada waktunya, maka hasil capaian IKU kurang maksimal.

Rekomendasi rencana aksi:

Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan seluruh KPKNL di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

16. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	105,24%	102,66%	103,40%	103,73%	107,05%	95.03	95.03	
Capaian	105,24%	102,66%	103,40%	103,73%	107,05%	120%	120%	
Capaian Kinerja	105.24%	103.4%	103.4%	103%	111.55%	120%	120%	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%					120%(120%)
2023	100%	95	95	95	-	100%(106.64%)
2022	95.50%	95	95	95	-	98.12%
2021	95.50%	95	95	95	-	102%
2020	95%	95	95	95	-	102.39%

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor



245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terdapat beberapa perubahan kewenangan revisi anggaran.
3. S-151/KPN.2602/2023 hal Pelaporan Data Capaian Output Belanja K/L TA 2023 pada Aplikasi SAKTI.

Implikasi:

1. Implementasi Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022;
2. Kemudahan dalam melakukan revisi anggaran kewenangan Kanwil Perbendaharaan;
3. Implementasi S-151/KPN.2602/2023.

Akar masalah:

Satuan kerja diberikan kesempatan 1 kali revisi kewenangan Kanwil Perbendaharaan setiap triwulan sehingga rencana kerja harus disusun dengan baik.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin setiap bulan;
2. Permintaan Rencana Kerja Bagian/Bidang dan usulan revisi anggaran Triwulan IV pada Bidang/Bagian di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah;
3. Melakukan koordinasi dengan bidang dan bagian terkait penyerapan anggaran setiap bulan.

Rekomendasi rencana aksi:

1. Melakukan Revisi Kewenangan Kanwil Perbendaharaan terkait pemenuhan kebutuhan organisasi dan pencapaian Nilai IKU IKKPA pada komponen Halaman III DIPA;
2. Melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang terkait rencana kerja triwulanan.



17. Persentase Deviasi PNBP Fungsional DJKN

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Persentase Deviasi PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	Min/TLK
Realisasi	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	15%	-	-	-	-	0%(120%)
2023	15%	-	-	-	-	0%(120%)
2022	10%	-	-	-	-	0.1%(120%)
2021	12.50%	-	-	-	-	0%(120%)
2020		-	-	-	-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

Deviasi data antara dropbox dengan OM SPAN

Implikasi:

Data PNBP Bea Lelang yang disajikan menjadi tidak akurat.

Akar masalah:

1. Kesalahan penginputan pada aplikasi sharing folder Dropbox ataupun pada aplikasi OM SPAN
2. Pengambilan cut off date data yang berbeda sehingga menyebabkan perbedaan data khususnya di Pegadaian
3. Kesalahan penyeteroran bea lelang yang dilakukan oleh Pemohon Lelang



Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan PIC KPKNL terkait pelaporan dengan mengoptimalkan grup WA dengan PIC KPKNL;
2. Melakukan monitor secara berkala pada aplikasi OMSPAN;
3. Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak Internal (Bagian Umum) dan Eksternal (Pegadaian).

Rekomendasi rencana aksi:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi dengan PIC KPKNL terkait pelaporan.
2. Melakukan monitor secara berkala pada aplikasi OMSPAN.
3. Melakukan Rekonsiliasi dengan Pihak Internal (Bagian Umum) dan Eksternal (Pegadaian)

18. Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	Max/TLK
Realisasi	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	5,23	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	3.55%				-	5.23%(120%)
2023		-	-	3.55	-	
2022		-	-	3.5	-	
2021					-	
2020					-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

Belakangan ini, Kementerian Keuangan sedang mendapatkan sorotan dari netizen. Berawal dari kasus RAT, hingga *issue* adanya aliran dana mencurigakan sebesar Rp300 Triliun yang seolah menjadi sasaran empuk bagi pengguna media sosial dalam menyampaikan komentar liarnya. Dalam sebuah kesempatan, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa *trend* alur informasi yang berkembang saat ini, yang menjadi aspek terpenting dan utama adalah kecepatan tanpa memperhatikan akurasi dan validitas. Tentu saja pergerakan informasi yang cepat dan tidak valid akan sangat rentan menjadi penggiringan opini dan bila tidak diantisipasi maka dapat membahayakan reputasi bagi objek yang disasar bahkan termasuk organisasi yang menaunginya

Implikasi:

Untuk mencegah hal tersebut di atas terjadi, salah satu bentuk antisipasi yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan *Employee Advocacy*.

Akar masalah:

PIC EA dalam lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah tidak melakukan amplifikasi konten EA

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Memenuhi agenda setting dari kantor pusat DJKN
2. Memantau pelaksanaan *employee advocacy* di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah

Rekomendasi rencana aksi:

1. Mengamplifikasi konten medsos Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan SMI pada media sosial kantor
2. Melaporkan amplifikasi pada *spreadsheet* pelaporan eksis vertikal Kemenkeu
3. Mendorong pegawai untuk melakukan aktifasi EA

19. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Komunikasi Publik yang Efektif							
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	110	100	100	100	100	100	100	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	



Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	80%	-	-	-	-	100%(120%)
2023		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Implikasi:

1. Kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.
2. Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan.
3. Jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 adalah 17 hari kerja.
4. Pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya.
5. Memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia



Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Akar masalah:

1. Pengguna layanan informasi tidak puas, sehingga mengajukan keberatan
2. Data informasi yang diminta sulit dicari sehingga norma waktu terlewat

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan
2. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website

Rekomendasi rencana aksi:

1. Meng-update daftar infor-masi publik setiap triwulan pada website kantor.
2. Menyusun laporan PPID tahunan
3. Menyampaikan informasi publik atas permintaan pengguna layanan sesuai norma waktu

20. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	5	15	15	20	61.32	82	82	Max/TLK
Realisasi	10	20	20	20	20	99.02	99.02	
Capaian	120	120	120	120	49.19	120	120	
Capaian Kinerja	100	120	120	100	24.39	120	120	

Adapun perbandingan Capaian Kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Indeks efektifitas UKI

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	82%	-	-	-	-	99.02%(120%)
2023	-	-	-	80	-	
2022	-	-	-	75	-	
2021	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	



Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE)
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA)
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP)
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS)
6. Penyusunan Profil Pegawai
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders
11. Hasil Survei Penilaian Integritas

Implikasi:

Memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Akar masalah:

Ada segelintir oknum pegawai Kementerian Keuangan melakukan perbuatan tercela dan merupakan kategori pelanggaran kode etik maupun tindakan Fraud yang mempengaruhi citra organisasi.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Q1 Penyampaian Laporan Efektifitas Pengendalian Intern/LEPI (5%)
2. Q2 Penyampaian Laporan Efektifitas Pengendalian Intern /LEPI (5%) Rencana Pemantauan Tahunan (5%) Fraud Risk Scenario (5%)
3. Q3 Hasil pemantauan pengendalian intern pada Semester I 2024 LHPPU Semester I 2024 (20%)



Rekomendasi rencana aksi:

Q4 (Sesuai target Es. I) = Nilai Komponen Pengungkit (25%) + Nilai Komponen Proses (25%) + Nilai Komponen Hasil (50%)

21. Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	November	s.d. Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	105%	105%	
Capaian	100	100	100	100	100	105	105	

Berikut adalah tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%	-	-	-	-	105%(105%)
2023		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2021	75	-	-	-	-	96.84(129.12%)
2020		-	-	-	-	

Terdapat proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Isu Utama:

1. ND-71/KN.1/2024 tanggal 8 Januari 2024 hal Permintaan Konfirmasi Keikutsertaan pada Penilaian ZI-WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2024.



2. Selanjutnya Kepala Biro Organta kembali menyampaikan nota dinas nomor ND-37/SJ.2/2024 tanggal 12 Januari 2024 hal Penyampaian Informasi Lanjutan terkait Rencana Usulan Satuan Kerja Peserta Penilaian WBK dan WBBM Kementerian Keuangan Tahun 2023. Dalam nota dinas tersebut disampaikan bahwa sesuai hasil rapat antara Biro Organta dan Tim Penilai Kementerian (d.h.i. Inspektorat Jenderal Kemenkeu), bagi unit kerja yang akan diusulkan mengikuti penilaian ZI-WBBM agar dilakukan *screening* terlebih dahulu dengan memperhatikan beberapa poin penting, antara lain:
3. Beberapa kondisi yang mendukung yaitu:
 - a. NKO tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan NKO tahun 2022;
 - b. Sudah melakukan pembangunan (membuat SK Tim dan Rencana Kerja) sejak Januari 2023;
 - c. Tidak terdapat catatan fraud dalam kurun waktu 1 Januari 2023 s.d. tahun berjalan;
 - d. Seluruh temuan BPK dan Itjen telah ditindaklanjuti 100%;
 - e. Pelaporan LHKPN dan LHKASN 100% disertai bukti yang lengkap;
 - f. Sudah melakukan profiling terhadap seluruh pejabat dan pegawai di unit kerja;
 - g. Memiliki inovasi yang sudah terimplementasi minimal satu tahun sejak Januari 2023;
 - h. Sudah dilakukan evaluasi atas dampak dari inovas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Implikasi:

Sebagaimana hasil self assessment yang unit kerja lakukan dan hasil pembahasan dengan Inspektorat IV selaku Tim Penilai Kementerian bagi DJKN pada hari Rabu, 17 Januari 2024 atas hasil self assessment dimaksud, mengusulkan Kanwil DJKN KST untuk mengikuti penilaian ZI-WBBM tahun 2024.

Tindakan yang dilaksanakan:

1. Kegiatan Pembaruan Pencanangan ZI-WBBM Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan undangan Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor UND-25/WKN.12/2024 tanggal 6 Februari 2024 hal Undangan Pembaruan Pencanangan ZI-WBBM Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
2. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zi-WBBM pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor KEP-52/WKN.12/2024 tanggal 3 April 2024
3. Berbagai kegiatan dan inovasi yang telah dibuat dan dilaksanakan dalam mendukung tuisi dan layanan dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani



4. Telah dilakukan penilaian oleh TPN dari KemenPAN-RB

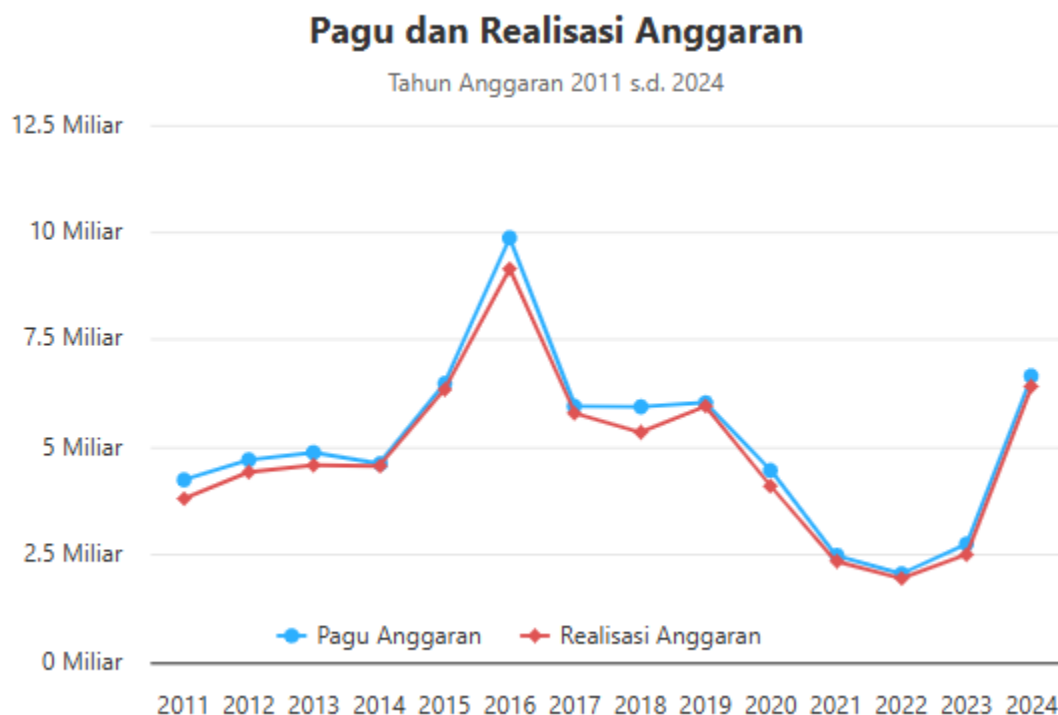
Rekomendasi rencana aksi:

Melakukan kegiatan pendalami-laman kembali substansi dalam bahan paparan sebelum wawancara dengan TPN dilakukan.

B. Analisa atas Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran strategis tentunya diperlukan berbagai sumber daya yang menunjang dalam pelaksanaannya, salah satunya dalam hal terkait dana/anggaran. Dalam perencanaan kegiatan anggaran dana menjadi hal penting yang harus diperhitungkan. Dalam pengelolaan anggaran, perlu menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Pengelolaan anggaran dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu tentunya akan menjadi lebih baik apabila pencapaian kegiatan dapat diraih dengan mengedepankan efisiensi anggaran.

Untuk unit Kementerian Keuangan efisiensi penggunaan anggaran telah disampaikan dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Adapun realisasi anggaran pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebagai berikut:





Komposisi Realisasi Anggaran

Akun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
Belanja Barang	2.992.867.000	2.457.437.083	92,13%
Belanja Modal	3.669.655.000	3.662.159.900	99,82%

Dari grafik dan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dari target yang telah ditetapkan. Meskipun alokasi anggaran tidak digunakan secara menyeluruh, namun pencapaian kinerja dapat maksimal melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi sumber daya finansial dengan target yang dibebankan sudah terpenuhi.

C. Kinerja Lainnya

1. Penghargaan

- Pada tahun 2024 Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah kembali memperoleh penghargaan atas keberhasilannya sebagai salah satu dari tiga unit terbaik dalam perolehan Nilai Kinerja Organisasi dan Manajemen Kinerja.





- b. Penghargaan juga diperoleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah atas prestasinya sebagai salah satu dari tiga unit terbaik Manajemen Risiko Tahun 2024.



- c. Penghargaan diberikan kepada Sdr. Purwito (Kepala Seksi PKN I) sebagai Juara III Pejabat Pengawas Terbaik DJKN Tahun 2024;

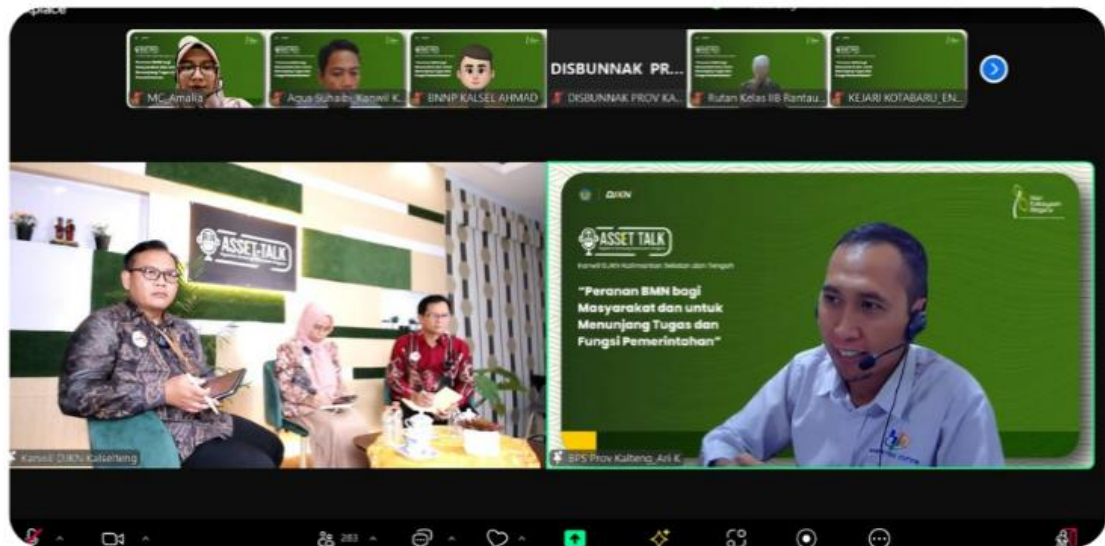




d. Asset Talk Bidang PKN merupakan salah satu rangkaian acara dari puncak Ulang Tahun Kekayaan Negara Ke-18 Tahun 2024. Dalam kegiatan akan membahas seputar tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pada sesi pertama yaitu membahas terkait Pengelolaan Kekayaan Negara, dengan tema “Peranan BMN bagi Masyarakat dan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi Pemerintahan”. Kegiatan Asset Talk diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai pada satuan kerja terhadap pengelolaan Barang Milik Negara terutama terkait optimalisasi penggunaan aset yang berada pada unitnya.
- 2) Mengembangkan kompetensi dan keterampilan pegawai dalam diskusi interaktif berbagi pengalaman dan penyelesaian permasalahan pengelolaan BMN yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 3) Membangun kerjasama, koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

Sebanyak 281 peserta yang hadir mengikuti melalui zoom meeting dan sejumlah 281 peserta mengikuti melalui zoom meeting.



e. Sinergi Kolaborasi dengan Instansi Pengguna dilaksanakan pada hari Kamis, 5 September 2024, pukul 09.00 WITA s.d selesai, kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah diselenggarakan di Gedung Mahligai Pancasila Jalan Suprpto, Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Tujuan kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara bersama Pemerintah Daerah di Provinsi



Kalimantan Selatan dan Tengah yang menekankan pembahasan terkait mekanisme pembentukan PFPP, sosialisasi lelang hak menikmati dan pengurusan piutang daerah dilakukan sebagai upaya untuk memberikan ruang diskusi dan bimbingan teknis secara lebih terstruktur sehingga terjadi pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta yang hadir. Beberapa agenda pemaparan yang telah disampaikan pada kegiatan tersebut antara lain menyampaikan pemaparan terkait mekanisme pembentukan PFPP di lingkup Instansi Pengguna dimulai dari mekanisme pengangkatan, standar kompetensi dan pemenuhan kompetensi berkelanjutan. Selain itu disampaikan pemahaman terkait pedoman teknis penilaian bagi PFPP di Instansi Pengguna, sebagaimana tertuang dalam SE-01/MK.6/2023.

Acara ini terselenggara dari inisiatif Bidang Penilaian sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait tema "Mekanisme Pembentukan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah". Namun demikian, kegiatan inimerupakan kegiatan sinergi dan kolaborasi dari seluruh bidang teknis, sehingga kegiatan ini, tidak saja mengenalkan peran Kanwil DJKN di bidang penilaian, namun sekaligus bentuk upaya sinergi dan kolaborasi antar unit yang bertujuan untuk melakukan penggalian potensi lelang khususnya hak menikmati dengan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD). Pelaksanaan Lelang hak menikmati diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mekanisme pemanfaatan BMD sehinggadapat berperan maksimal dalam optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) maupun penerimaan negara. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi dan kolaborasi yang harmonis antara Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dengan Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme pembentukan PFPP, Lelang Hak Menikmati, dan Pengurusan Piutang di Pemerintah Daerah, dan dikemudian hari hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan DiektoratJenderal Kekayaan Negara, dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1/MK.06/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Jabatan Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Pejabat FungsionalPenilai Pemerintah (PFPP), serta Upaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Penilai pada Instansi Pengguna, maka diperlukan pemahaman dalam mekanisme Pembentukan PFPP di Instansi Pengguna. Dalam rangka mewujudkan bentuk sinergi dan

kolaborasi antara Kanwil DJKN dengan Pemerintah Daerah diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, maka dilaksanakan kegiatan koordinasi sehingga diharapkan kegiatan ini mampu memberi ruang diskusi terkait mekanisme pembentukan PFPP pada Instansi Pengguna beserta penggunaan regulasi di bidang penilaian sebagai pedoman PFPP dalam pelaksanaan tugas teknis di bidang Penilaian. Pedoman Pelaksanaan Tugas Jabatan PFPP diInstansi Pengguna, Sharing Best Practice kegiatan Penilaian BMD oleh PFPP Ahli Muda Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemaparan Peraturan Menteri Keuangan, terkait Lelang Hak Menikmati sebagaimana tertuang dalam PMK 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; serta Pemaparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN.



- f. Asset Talk Bidang Penilaian Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Berdasarkan undangan Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor UND-282/WKN.12/2024 tanggal 5 November 2024 hal Undangan Asset Talk Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam rangka Hari Kekayaan Negara (HKN) ke-18. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 pukul 09.00 WITA s.d.11.00 WITA secara virtual melalui tautan sebagai berikuthttps://linktr.ee/assettalk_kalselteng menggunakan media daring zoom dan chanel youtube. Kegiatan Asset Talk mengambil tema "Peran Penilai dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah". Acara diusung dalam Dialog Interaktif di ruang (studio) Rangkong Kanwil DJKNKalimantan Selatan dan Tengah Peran Penilai dalam Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Regulasi yang digunakan untuk penilaian BMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa penilaian adalah 1 dari 9 siklus pengelolaan barang milik daerah. Penilain BMD di Kalimantan

Selatan melayani permohonan baik dari provinsi/kab/kota. Dengan dasar surat permohonan, maka Penilai akan melakukan verifikasi data permohonan penilaian, survey, pelaksanaan penilaian, mencari pembanding penilaian, membuat laporan penilaian kemudian melaksanakan peer review. Dalam sambutannya Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, menyampaikan bahwa Asset Talk dilaksanakan dalam rangka Hari Kekayaan Negara (HKN) ke-18, tujuannya untuk mengenalkan tugas dan fungsi serta peran strategis Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) kepada seluruh pengguna layanandan masyarakat. Kusumawardhani menyampaikan sebagai pengelola asset baik berupa BMN/Dtantangan yang paling menarik adalah bagaimana menyajikan nilai BMN/D dalam LKPP/LKPD dengan nilai yang wajar. Peran Penilai menjadi sangat penting dalam tata kelola pemerintahan dengan cara tetap menjaga kualitas, professional dan mengedepankan prinsip enterpreunership. Kapasistas dan kompetensi kita harus terus ditingkatkan. Sebagai bagian dari Pengelola Barang, peran penilai sangat krusial untuk memastikan apakah terhadap BMN/D telah dimanfaatkan/dikelola/dinilai secara tepat dan akurat sehingga dapat mendukung kebijakan strategis untuk para pemangku kepentingan. Materi diskusi interaktif dipandu oleh Evi Rahmawati selaku Kepala Seksi Penilaian II bersama dengan narasumber Bayu Firdaus selaku PFPF Ahli Madya Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dan Muhammad Haris Arsyad selaku PFPF Ahli Muda pada BPKAD Provinsi Kalimantan Selatan.



- g. Acara Nasional Valuasi (Carnival) Tahun 2024 telah dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Kegiatan tersebut memiliki tema “Transforming Property Valuation: Integrating Sustainability in Valuation Practices” yang menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari webinar, knowledge sharing, focus group discussion, serta beberapa perlombaan. Terkait dengan kegiatan perlombaan dalam Carnival Tahun 2024, Sdr. Bayu Firdaus selaku PFPF Ahli Madya Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah terpilih menjadi pemenang Juara I Lomba Foto Penilaian,



- h. Kegiatan Semarak 116 Tahun Lelang. Dalam rangka turut memeriahkan Semarak 116 Tahun Lelang di Tahun 2024, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menyelenggarakan beberapa kegiatan antara lain Public Campaign terkait lelang kepada masyarakat dalam event Car Free Day di area Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 3 Mei 2024 serta kegiatan Broadcasting edukasi lelang yang bekerjasama dengan MOZAIK Indonesiamelalui media RRI Pro 1 Banjrmasin dengan Tema "Modernisasi Regulasi dan Layanan Lelang Menyongsong Era Industri 5.0".
- Tujuan dari kegiatan Public Campaign terkait lelang adalah untuk memperkenalkan lelang kepada masyarakat umum bahwa proses pelaksanaannya dapat melalui KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I), Pejabat Lelang Kelas II, maupun Balai Lelang, serta berupaya untuk mengenalkan produk lelang dengan menggandeng Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Dalam event ini, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah juga menyempatkan melakukan kampanye anti korupsi untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan pengawalan atas integritas para pihak yang terkait pelayanan publik. Guna menarik animo masyarakat sekitar untuk datang, kegiatan ini diawali dengan pelaksanaan senam bersama, pembagian sarapan gratis, serta doorprize bagi yang beruntung. Dari hasil diskusi dan beberapa testimoni dari pengunjung car free day, masyarakat merespon positif dan sangat antusias dalam menyimak dan mengikuti alur penjelasan dari tim Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan



Tengah terkait mekanisme lelang. Tak lupa, tim Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan tentang lelang yang mengatasnamakan pejabat/pegawai DJKN yang saat ini sedang marak terjadi.



Pada hari yang sama, Kanwil DJKN juga menyelenggarakan Broadcasingedukasi lelang yang bekerjasama dengan MOZAIK Indonesia melalui media RRI Pro 1 Banjarmasin dengan Tema "Modernisasi Regulasi dan Layanan Lelang Menyongsong Era Industri 5.0". Tujuan dari kegiatan ini adalah agar dapat menjangkau masyarakat dengan skala yang lebih luas melalui saluran radio hasil kolaborasi dengan RRI Banjarmasin. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah turun langsung dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan ini dengan didampingi oleh Kepala Bidang Lelang dan salah seorang Pejabat Lelang Kelas I dari KPKNL Banjarmasin. Mengingat kegiatan Semarak 116 Tahun Lelang di Tahun 2024 ini dilaksanakan secara serempak pada tanggal 3 Mei 2024, maka tim Kanwil DJKN melakukan pembagian tugas untuk kegiatan Public Campaign pada Event Car Free Day serta pada Kegiatan Broadcasting Edukasi Lelang. Kegiatan Broadcasting Edukasi Lelang juga berjalan dengan sangat lancar dan dengan banyaknya diskusi interaktif antar pembicara selaku narasumber dan Pejabat Lelang Kelas I sebagai praktisi di lapangan yang semakin menambah keluasan ilmu terkait teknis pelaksanaan dan ketentuan lelang bagi para pendengar.



- i. Pada pelaksanaan kegiatan asset talk Tahun 2024 ini, Bidang Lelang berkesempatan mengisi 2 (dua) sesi di tanggal 13 dan 14 November 2024. Tema yang diambil adalah knowledge sharing terkait mekanisme Lelang Hak Menikmati untuk di tanggal 13 November 2024, dan knowledge sharing terkait Portal Lelang Harat Banar diambil sebagai tema diskusi di tanggal 14 November 2024. Pelaksanaan kegiatan ini turut melibatkan Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II sebagai narasumber yang menjelaskan teknis pelaksanaan lelang sesuai praktek rutin yang dilaksanakan oleh mereka. Secara umum, pelaksanaan asset talk berjalan sesuai harapan, yang dapat dilihat dari banyaknya atensi dan pertanyaan yang diajukan oleh para audience baik secara langsung melalui aplikasi zoom ataupun melalui kolom komentar yang telah disediakan. Pada moment kegiatan ini juga diumumkan dan disampaikan apresiasi atas peraih predikat Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II Terbaik Tahun 2024 yang penyampaian langsung dilakukan oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.



**Pelaksanaan Asset Talk
dengan Tema Lelang**

**Dilaksanakan dalam 2 sesi,
pada tanggal 13 dan 14
November 2024**

- j. SOLID bersama BRI terkait Lelang. Kegiatan SOLID (Sosialisasi dan Edukasi) terkait lelang yang bersamaan dengan pelaksanaan BRI Expo ini dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Desember 2024 bertempat di Duta Mall Banjarmasin. Kegiatan ini menggambarkan kolaborasi yang solid antara BRI Regional Office Banjarmasin dan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah untuk lebih mengenalkan platform lelang kepada masyarakat luas. BRI Regional Office Banjarmasin mengalokasikan salah satu booth untuk Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sebagai sarana memperkenalkan lelang kepada pengunjung Duta Mall Banjarmasin.

Dalam kurun waktu 4 hari dimaksud, edukasi terkait lelang disediakan dalam berbagai konsep, antara lain pelaksanaan lelang gadget oleh BRI, penyediaan berbagai brosur menarik terkait lelang, talkshow dengan tema lelang dan menghadirkan Pejabat Lelang Kelas I, pendampingan registrasi akun lelang, serta berbagai informasi terkait daftar barang yang akan/available untuk di lelang. Para pengunjung Duta Mall Banjarmasin tampak sangat bersemangat sekali menyimak pelaksanaan talkshow lelang dan penjelasan dari tim Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang secara bergantian berjaga pada booth yang telah disediakan.



- k. Sosialisasi Mekanisme Lelang Barang Milik Desa (BMDes). Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 (dua) periode, yakni pada tanggal 14 Desember 2024 atas undangan dari pihak Kecamatan Banua Lawas, dan pada tanggal 21 Desember 2024 atas undangan dari pihak Kecamatan Murung Pundak, Kabupaten Tabalong yang mana keduanya diselenggarakan di Banjarmasin dengan dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan perangkat desa di Kecamatan Banua Lawas. Undangan ini merupakan tindak lanjut



atas penyesuaian informasi terkait lelang BMDes yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sejak awal tahun.

Kehadiran dari perwakilan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menertibkan aset desa, terutama yang dalam kondisi tidak lagi layak pakai dan berpotensi untuk dijual secara lelang, sehingga membantu penyajian laporan keuangan yang lebih wajar. Inisiatif dari Kecamatan Banua Lawas dan Murung Pundak untuk mengundang Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penggalan potensi terkait lelang BMDes yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Kabupaten Balangan pada Bulan Agustus 2024.



**Pelaksanaan Sosialisasi Mekanisme
Lelang Barang Milik Desa**

**Melibatkan Seluruh Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang ada di
Kecamatan Banua Lawas**



**Pelaksanaan Sosialisasi Mekanisme
Lelang Barang Milik Desa**

**Melibatkan Seluruh Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang ada di
Kecamatan Murung Pundak**



- l. Keikutsertaan Portal Lelang Harat Banar dalam Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara (KIKN) Tahun 2024. Menindaklanjuti nota dinas Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-1951/KN.1/2024 tanggal 10 Juni 2024 hal Kick Off Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara (KIKN) Tahun 2024, Bidang Lelang Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berinisiatif untuk mengikutsertakan salah satu inovasi pada Bidang Lelang yakni Portal Lelang Harat Banar pada kegiatan KIKN Tahun 2024 tersebut sebagai perwakilan inovasi dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Sesuai nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-3942/KN.1/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Portal Lelang Harat Banar diumumkan sebagai salah satu dari 2 (dua) inovasi terpilih untuk maju ke babak akhir wawancara dalam rangka menentukan pemenang KIKN Tahun 2024 yang mana wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024. Pasca pelaksanaan wawancara di tanggal 7 November 2024 tersebut, puncaknya adalah pada akhir bulan November dimana melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-130/KN/2024 tanggal 25 November 2024, Portal Lelang Harat Banar dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah ditetapkan sebagai Peringkat Terbaik Pertama Kompetisi Inovasi Kekayaan Negara Tahun 2024 untuk Kategori Inovasi.



- m. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya dengan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah pada tanggal 7 Mei 2024 dengan Tujuan pelaksanaan penandatanganan kerja sama tersebut yaitu untuk penyelesaian piutang daerah pada Pemerintah Kota Palangka Raya khususnya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- n. DJKN Goes to Campus Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 22 November 2024 di Lecture Theater Building Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini mengusung tema “Jaga Aset Negara dengan Integritas Tinggi Menuju Indonesia Maju”. Bertujuan untuk memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat dalam hal ini mahasiswa terkait tugas dan fungsi DJKN. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berisi acara diskusi terkait kekayaan negara, simulasi lelang dan penyuluhan Anti Korupsi.



- o. Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah MARAWA 2024. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah MARAWA 2024 Nomor UND-30/WKN.12/2024 dan UND-31/WKN.12/2024 tanggal 15 Februari 2024. Rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 pukul 09.00 s.d. 12.00 WITA bertempat di Aula Antasari Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Adapun kegiatan Marawa tersebut dilaksanakan sebagai sarana untuk mendapatkan feed back atas layanan yang telah diberikan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.





- p. Swara Barito sebagai grup paduan suara dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah berhasil menjadi juara 3 dalam Lomba Paduan Suara DJKN 2024. Final Paduan suara dilaksanakan pada Rabu, 20 November 2024 sebagai bagian untuk memeriahkan Hari Kekayaan Negara ke 18.



2. Inovasi/Achievement

- a. Bincang Aset KST dilaksanakan sebagai upaya peningkatan peran dan fungsi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah (KST) yaitu melaksanakan tugas pembinaan dan bimbingan, serta supervisi bagi KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN KST. Bincang Aset tidak hanya merupakan implementasi tugas pembinaan ke KPKNL lingkup Kanwil DJKN KST, yakni KPKNL Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan Banjarmasin, namun juga merupakan wadah bagi pembinaan dan edukasi pengelolaan kekayaan negara terhadap Koordinator Wilayah satuan kerja dan satuan kerja terkait di wilayah kerja Kanwil DJKN KST, yaitu Propinsi Kalimantan Selatan dan Tengah. Bincang Aset KST juga dimaksudkan sebagai wadah untuk berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan, sharing permasalahan dan solusi atas kekayaan negara di Propinsi Kalimantan Selatan dan Tengah. Bincang Aset KST dimaksudkan sebagai peningkatan layanan Kanwil DJKN KST kepada para pengguna jasa. Adapun tujuannya yaitu:
- 1) Peningkatan peran dan fungsi Kanwil DJKN KST sebagai pembina dan supervisor bagi KPKNL;
 - 2) Peningkatan peran dan fungsi Kanwil DJKN KST sebagai pembina Koordinator Wilayah Satuan Kerja di Propinsi Kalimantan Selatan dan Tengah;
 - 3) Peningkatan edukasi pengelolaan kekayaan negara bagi para pengguna jasa di Propinsi Kalimantan Selatan dan Tengah;
 - 4) Menyediakan forum untuk sharing masalah dan solusi pengelolaan kekayaan negara;
 - 5) Sebagai wadah gugus kendali mutu pengelolaan BMN;
 - 6) Mewujudkan pengelolaan BMN yang lebih berkualitas.



Pada prinsipnya dilaksanakan secara daring, namun dalam hal secara penganggaran memungkinkan, dapat dilaksanakan secara luring dan atau hybrid. Sesi Bincang Aset dilakukan dengan opsi sesi KPKNL atau KPKNL dan Korwil satker serta satker terkait. Dilaksanakan setiap bulan pada Minggu III.



- b. Laboratorium Aset merupakan wadah bagi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah untuk berdiskusi secara mendalam kepada pengguna jasa pengelolaan kekayaan negara yang diundang secara luring. Pengguna Jasa yang terundang sebelumnya dilakukan profiling oleh Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah guna mengetahui eksisting pengelolaan dan penatausahaan BMN yang telah berjalan serta potensi yang ada. Lab Aset merupakan inovasi orisinal Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang merupakan evaluasi dan pengembangan atas pelaksanaan layanan yang selama ini telah dilakukan. Program Lab Aset akan memetakan, mengupas, membahas, dan memberikan rekomendasi pengelolaan dan penatausahaan aset pada pengguna jasa yang diundang. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:
- 1) Meningkatkan peran dan kontribusi Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam pengelolaan aset pengguna jasa;
 - 2) Memberikan rekomendasi teknis atas pengelolaan dan penatausahaan aset;
 - 3) Memberikan rekomendasi/solusi atas permasalahan aset pada pengguna jasa.
- Selam tahun 2024 ini telah Laboratorium aset telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri oleh 15 Korwil.



c. Login (Dialog Penilaian) diadakan atas dasar pemikiran bahwa diperlukan wadah untuk menguatkan sinergi Bersama anatar Kanwil DJKN dengan Fungsional Penilai di Kalimantan Selatan dan Tengah. Dilaksanakan secara rutin tiap bulan dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

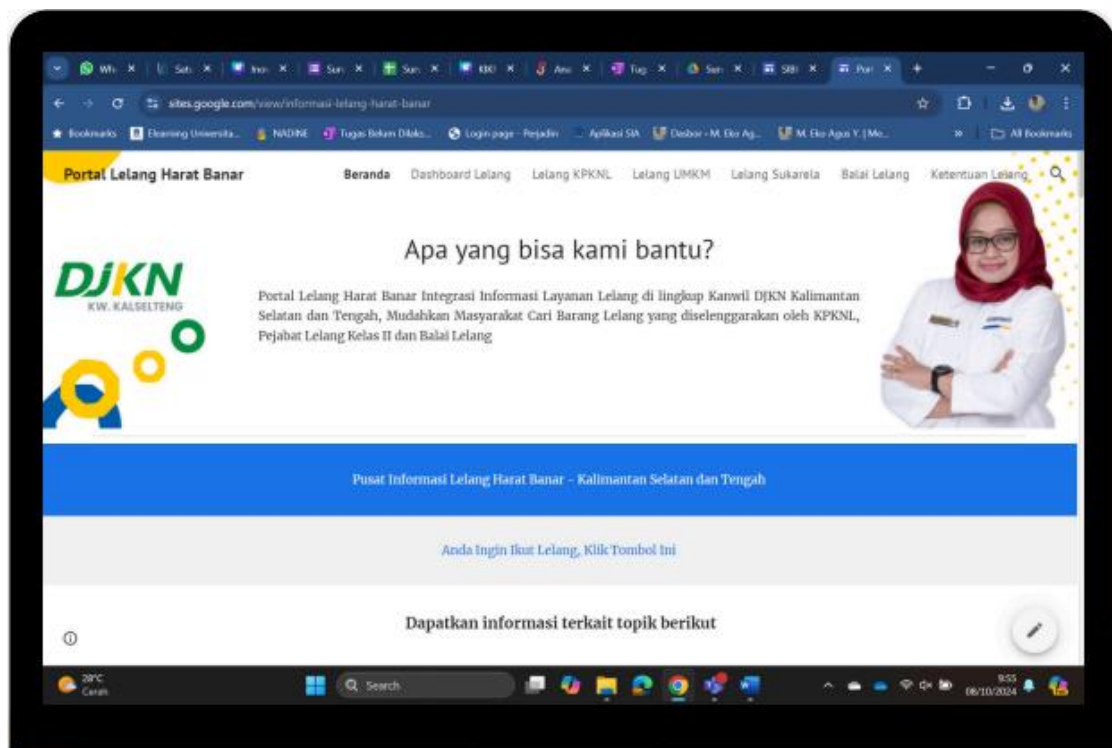
- 1) Pemantauan Progress capaian target di bidang penilaian
- 2) Diskusi terkait masalah/kendala di bidang penilaian
- 3) Sharing Knowledge peraturan/teknis Penilaian
- 4) Pembahasan Current Issue di bidang Penilaian

Kegiatan Dialog Penilaian mampu membawa dampak positif berupa peningkatan kompetensi PFPF dan berperan efektif sebagai sarana pembinaan antara Kanwil DJKN dengan Para Penilai di Lingkup Kalimantan Selatan dan Tengah.





- d. Portal Lelang Harat Banar merupakan inovasi dari Bidang Lelang Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dalam memberikan fasilitas pelayanan bagi stakeholder dan masyarakat terkait berbagai informasi lelang yang ada di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Inovasi ini disajikan dengan menggunakan google site yang mudah diakses oleh siapapun dan dari manapun berada. Portal Lelang Harat Banar menyediakan berbagai informasi terkait tautan termasuk jadwal lelang yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang, informasi pelaksanaan lelang UMKM, informasi kinerja lelang pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, ketentuan/peraturan lelang, brosur lelang, dan informasi lainnya yang sangat bermanfaat terkait pelaksanaan Lelang.



- e. SiBekantan PN (Situs Piutang Negara Bersama se Kalimantan) merupakan inovasi di bidang teknologi dari bidang Piutang Negara berupa aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data pengelolaan Piutang Negara yang tercakup dalam lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, adapun data yang ditampilkan melalui situs SiBekantan PN diantaranya berupa:
- 1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara Terhadap Perekonomian (Biad Pn)
 - 2) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
 - 3) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN
 - 4) Persentase Efektivitas Crash Program Keringanan Hutang



5) Persentase Rekonsiliasi Data PN

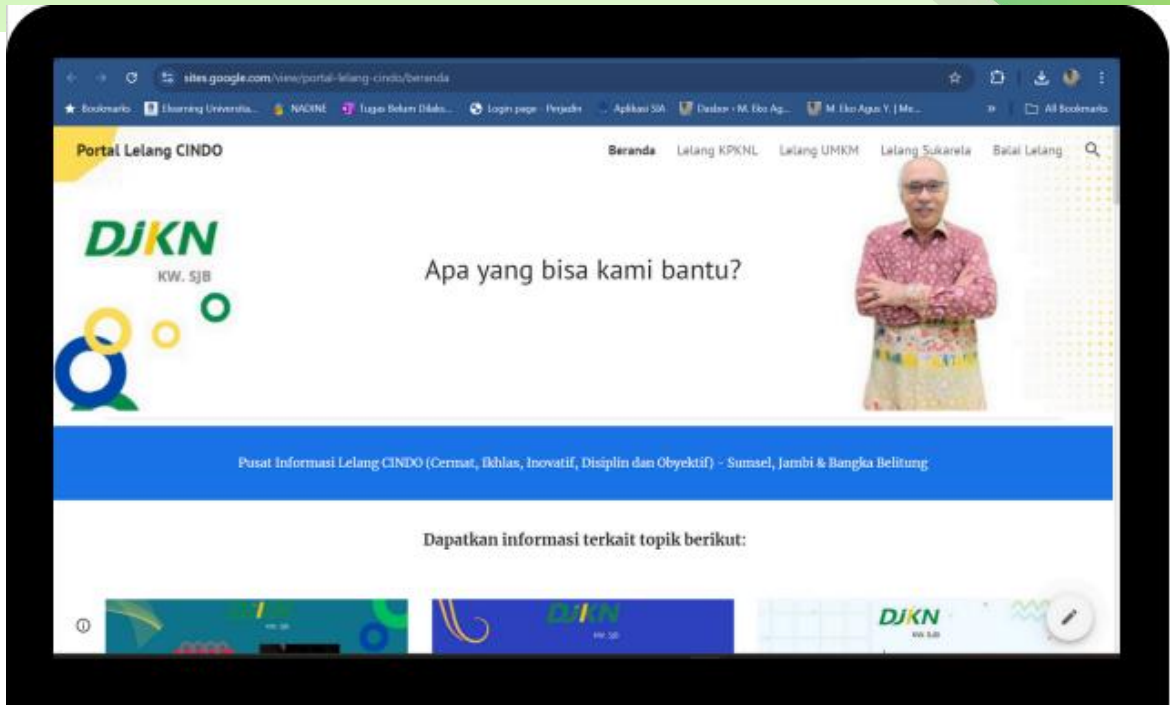
Digitalisasi Data Piutang Negara melalui SiBekantan PN berfungsi untuk mempermudah monitoring serta rekonsiliasi data capaian dan nominal rupiah dari proses pengurusan Piutang Negara pada suatu periode waktu tertentu. Data yang ditampilkan melalui aplikasi SiBekantan PN dapat dikelompokkan untuk setiap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang ada dalam lingkup Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Penerapan digitalisasi data Piutang Negara melalui SiBekantan PN juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Piutang Negara.

Dengan inovasi ini diperoleh hasil bahwa semua (100%) data dalam Berkas Kasus Piutang Negara dapat terintegrasi dalam SiBekantan PN. Penerapan SiBekantan PN mengurangi potensi kesalahan dalam penyajian data Piutang Negara dalam Lingkup Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah.

- f. Pelaksanaan Kegiatan Diskusi bersama melalui Kupas PN. Kupas Piutang Negara (Kupas PN) merupakan inovasi di bidang peningkatan layanan Pengurusan Piutang Negara di lingkup Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Kupas PN dilaksanakan dalam bentuk diskusi dengan KPKNL Banjarmasin, KPKNL Palangka Raya, dan KPKNL Pangkalan Bun setiap bulannya. Dalam Kupas PN dibahas mengenai Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Piutang Negara, serta pembahasan current issue Piutang Negara. Dari pelaksanaan inovasi tersebut diperoleh hasil bahwa Rekonsiliasi data capaian mencapai tingkat akurasi 100% berkat konfirmasi langsung dari KPKNL yang bersangkutan. Mitigasi risiko dan manajemen risiko yang lebih baik berkat pembahasan current issue pada bidang Piutang Negara.

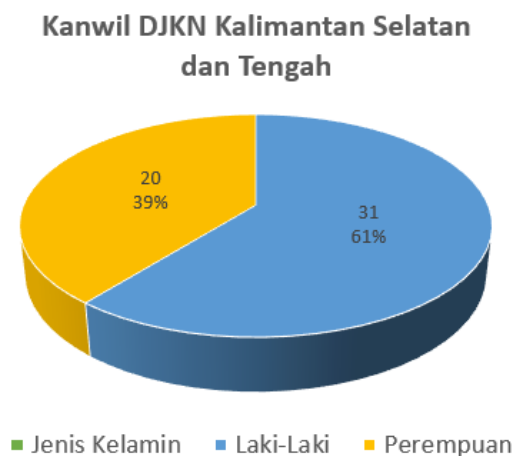
3. Replikasi

Salah satu inovasi dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah Portal Lelang Harat Banar. Portal Lelang Harat Banar merupakan integrasi informasi layanan Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II maupun Balai Lelang di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalselteng. Inovasi ini memudahkan masyarakat mencari barang melalui lelang, serta dapat digunakan sebagai sarana edukasi pelaksanaan lelang. Portal Lelang Harat banar menggunakan google sites, sehingga dalam proses pembangunan inovasi sangat mudah, murah, cepat, efisien namun tetap aman. Inilah beberapa alasan sehingga Portal Lelang Harat Banar sangat mudah direplikasi oleh unit lain. Kanwil DJKN di seluruh Indonesia berpeluang melakukan replikasi, karena memiliki karakter pelayanan yang sama. Saat ini Portal Lelang Harat Banar telah direplikasi oleh Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel sejak 23 April 2024 (KET32/WKN.04/2024).



4. Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

Jumlah sumber daya manusia yang ada di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah 51 orang. Adapun gambaran komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah adalah sebagaimana digambarkan oleh diagram dibawah ini.



Sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mampu berkinerja secara optimal dalam memberikan pelayanan adalah dengan menjaga keseimbangan posisi pegawai dalam mendukung kinerja di setiap unitnya. Penempatan/pemindahan pegawai pada bagian/bidang yang tepat menjadi arah pilihan kebijakan. Kondisi penempatan dan pemindahan pegawai diupayakan agar setiap bagian/bidang dapat terpenuhi sesuai

dengan analisis beban kerjanya (ABK). Selain itu juga mengelola kondisi mental dan psikis dari pegawai yang ditempatkan pada posisi kedudukannya. Pegawai yang dalam kondisi sehat dan bahagia akan mendukung kinerjanya. Salah satu dukungan dari Bagian Umum Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dengan mengembangkan PREMI, Preferensi Mutasi Internal bagi pegawai untuk menyesuaikan minatnya berkinerja pada bagian/bidang yang diinginkannya.

Untuk kegiatan pada Hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 bertempat di Aula Antasari, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu dengan melakukan Diseminasi PUG "Perempuan Menyapa: Menjaga Keseimbangan antara Karier dan Keluarga". Kegiatan ini merupakan salah satu program implementasi PUG pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai perempuan di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah dapat menjalankan tugas dan perannya sebagai ibu dan ASN dengan baik dan seimbang.



D. Realisasi Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah hasil evaluasi kinerja anggaran yang didapatkan dari dua komponen, yaitu:

1. Nilai evaluasi kinerja anggaran dari aplikasi SMART dengan bobot 60%
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari aplikasi OM-SPAN dengan bobot 40%

IKPA adalah alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan untuk mengukur kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.



MONEV | KEMENKEU



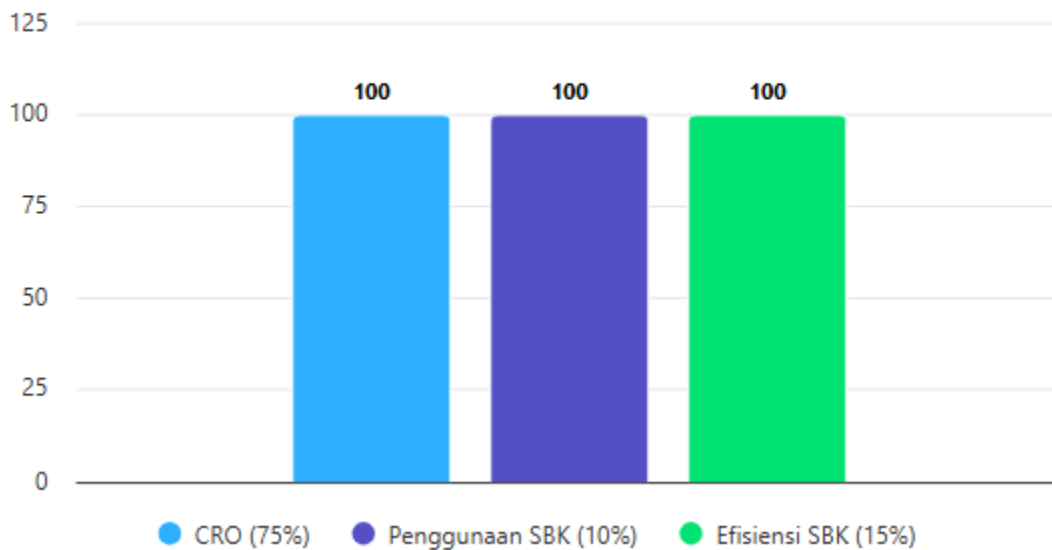
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah nilai yang didapatkan dari variabel efektivitas dan efisiensi. Variabel efektivitas dinilai dari capaian Sasaran Program, Sasaran Strategis, dan RO. Sementara variabel efisiensi dinilai dari penggunaan SBK, baik SBKK maupun SBKU.

NKPA merupakan bagian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. IKPA merupakan alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan untuk mengukur kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan salah satu aspek yang menjadi acuan dalam menentukan apakah anggaran yang diberikan telah dikelola dan dijalankan dengan baik. Aspek ini mencakup 2 indikator, yaitu indikator Revisi DIPA dan Deviasi Hal. III DIPA



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



Nilai kerja pelaksanaan anggaran adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah alat untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

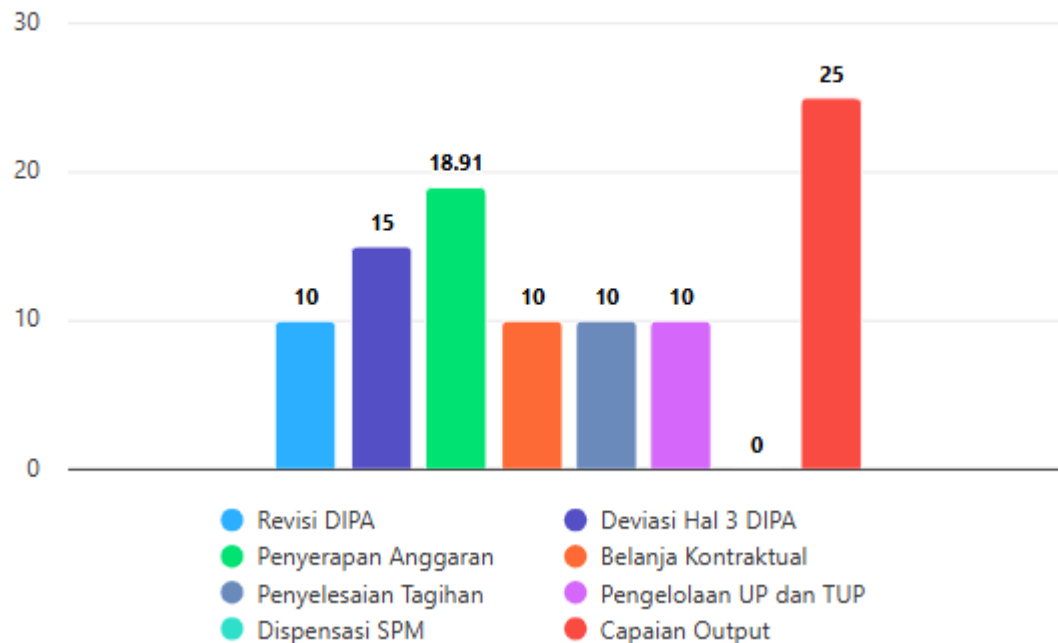
IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Nilai IKPA dihitung berdasarkan tiga aspek, yaitu: Kualitas perencanaan anggaran, Kualitas pelaksanaan anggaran, Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Setiap aspek memiliki indikator yang berbeda-beda. Misalnya, aspek kualitas perencanaan anggaran memiliki dua indikator, yaitu Revisi DIPA dan Deviasi halaman III DIPA. Sementara itu, aspek kualitas pelaksanaan anggaran memiliki lima indikator, yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

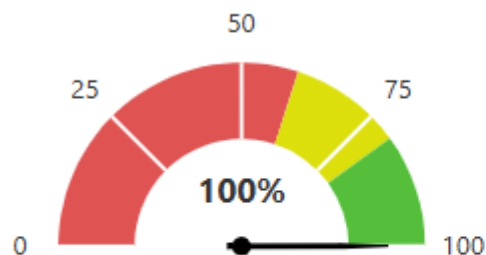
Nilai IKPA dirilis secara berkala setiap tanggal 15 bulan berikutnya melalui OMSPAN masing-masing Satker. Pimpinan dapat memantau perkembangan kegiatan satuan kerja secara berkala.



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Untuk Progres Rincian Output adalah sebagai berikut:



100.00 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Kanwil djkn kalimantan selatan dan tengah

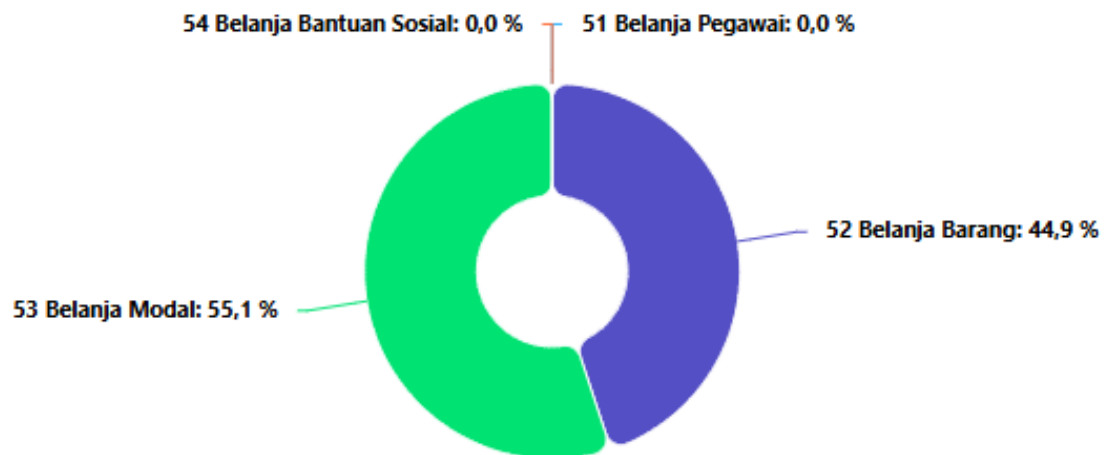
Pagu anggaran dan realisasi anggaran saling terkait dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Pagu anggaran membatasi penggunaan anggaran, sedangkan realisasi anggaran mencatat penggunaan anggaran secara aktual.

Untuk Komposisi Realisasi Anggaran adalah sebagaimana terinci dalam table berikut ini:

Akun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
Belanja Barang	2.992.867.000	2.457.437.083	92,13%
Belanja Modal	3.669.655.000	3.662.159.900	99,82%



Komposisi Alokasi Anggaran



Satker Money Kemenkeu

No	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	506327	KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	100	98,91	99,46

Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai Desember 2024

No	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output			
1	KANWIL DJKN KST	Nilai	100	100	94,54	100	100	99,98	100	98,9	100%	98,91
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25			



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

		Nilai Akhir	10	15	18,91	10	10	10	25			
		Nilai Aspek	100		98,63				100			
2	KPKNL PALANGKARAYA	Nilai	100	100	96,93	100	100	99,86	63,48	90,2	100%	90,24
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
		Nilai Akhir	10	15	19,39	10	10	9,99	15,87			
		Nilai Aspek	100		99,2				63,48			
3	KPKNL PANGKALAN BUN	Nilai	100	93,86	98,09	100	100	100	51,3	86,5	100%	86,52
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
		Nilai Akhir	10	14,08	19,62	10	10	10	12,83			
		Nilai Aspek	96,93		99,52				51,3			
4	KPKNL BANJARMASIN	Nilai	100	100	95,03	100	100	100	100	99	100%	99,01
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25			
		Nilai Akhir	10	15	19,01	10	10	10	25			
		Nilai Aspek	100		98,76				100			

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai Dengan : DIBERIKAN

No	Kode KPPN	Kode SA	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Simulasi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	045	015	586327	KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	Nilai	100.00	100.00	98.91	100.00	100.00	99.99	100.00	98.91	100%	0.00	98.91
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.91	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.83				100.00				

Laporan Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran Satker Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah s.d. Triwulan IV 2024.

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggara			Capaian s.d. Triwulan IV
A. Nilai IKPA			98,91%
1	Revisi DIPA		10,00%
2	Deviasi Halaman III DIPA		15,00%
3	Belanja Kontraktual		18,91%
4	Pengelolaan UP dan TUP		10,00%



	5	Penyerapan anggaran	10,00%
	6	Penyelesaian Tagihan	10,00%
	7	Capaian Output	25,00%
	8	Dispensasi SPM (Pengurang)	0,00%
B. Nilai SMART			100,00%
Nilai Capaian IKU IKA s.d. Triwulan IV			99,46%

Isu Utama:

1. Implementasi Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
2. Implementasi SBK di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) bahwa saat ini indikator efisiensi hanya memperhitungkan penggunaan RO SBK dan Efisiensi RO SBK (RO selain SBK tidak dihitung nilai efisiensinya).
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024.

Akar masalah:

Penyerapan anggaran Belanja Barang sampai dengan Triwulan IV TA 2024 pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga nilai pada indikator penyerapan anggaran belum bisa maksimal

Rencana Tindakan:

1. Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengirimkan Kartu Pengawasan (Karwas) secara rutin setiap bulan;
2. Telah dilaksanakan revisi anggaran demi terlaksananya penyerapan anggaran dan rencana penarikan dana yang optimal;
3. Permintaan Rencana Kerja Bagian/Bidang;
4. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang terkait penyerapan anggaran setiap bulan.

Aksi:

1. Melakukan Revisi Kewenangan Kanwil DJA terkait pemenuhan kebutuhan organisasi;
2. Melaksanakan pelaporan rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang terkait rencana kerja Tahun Anggaran 2025



Berikut adalah Indeks Kualitas Anggaran pada Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah tahun 2024:

No	Unit	Target 2024	Target Desember	Realisasi s.d. 31 Desember	Indeks Capaian s.d. 31 Desember	Indeks Capaian Tahunan
1	Kanwil Kalselteng	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%
2	KPKNL Palangka Raya	100,00%	100,00%	79,90%	79,90%	79,90%
3	KPKNL Pangkalan Bun	100,00%	100,00%	79,90%	79,90%	79,90%
4	KPKNL Banjarmasin	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%	120,00%



BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja atas perencanaan kerja, pelaksanaan tujuan serta sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah menyusun Laporan Kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kegiatan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah sekaligus menjadi acuan bagi upaya peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

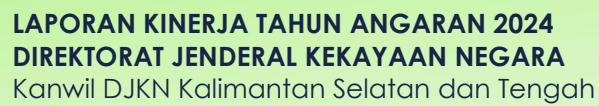
Pada tahun 2024, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang terbagi dalam 10 (sepuluh) Indikator Kinerja yang kesemuanya dapat tercapai dengan hasil yang optimal. Pencapaian ini sekaligus menjadi kontribusi bagi pencapaian kinerja pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Lebih lanjut, realisasi capaian target ini tidak hanya berdampak pada pencapaian individu/organisasi, namun lebih dari itu, realisasi atas kinerja yang telah dicapai juga memiliki manfaat yang terukur pada perekonomian, khususnya perekonomian regional di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sebagai bukti bahwa unit kerja Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah mendukung visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi DJKN, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian DJKN dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



Peta Strategi





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	1a-CP Indeks Integritas	89,17
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp35,513 M)
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-N Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2a2-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp396,4 M)
		2c-CP Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100% (Rp7,5 M)
3.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	3a-N Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	5a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	73,81 % (93 BKPN)
		5b-CP Persentase produktifitas lelang	89%





No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	6a-CP Persentase Deviasi Ketegunaan Hasil Penilaian	16%
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	7a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
		7b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		7c-N Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	75%
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		8b-N Persentase Deviasi data PNBFP Fungsional DJKN	10%
9.	Komunikasi Publik yang efektif	9a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55
		9b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
10.	Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah	10a-N Indeks efektivitas UKI	82
		10b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KEMENTERIAN KEUANGAN**

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 44.434.000,00
2. Monev Ferbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 306.862.000,00
3. Pengelolaan Aset	Rp 414.076.000,00
Dukungan Manajemen	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 5.240.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 5.617.948.000,00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 47.472.000,00

Direktur Jenderal Kekayaan Negara

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani





RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengetolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan							
1a-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengetolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
2a-N	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2a1-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
	2a2-N Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	86,5%	86,5%	86,5%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
3a-N	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
4	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%





5	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif							
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	90%	90%	84%	84%	73,81%	73,81%
5b-CP	Persentase produktifitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
6	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
6a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
7	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
7a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
7b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
7c-N	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75%	75%
8	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100%
8b-N	Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
9a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
9b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPIP)	80	80	80	80	80	80	80
10	Pengawasan dan pengendalian Internal yang bernilai tambah							
10a-N	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
10b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan
Tengah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani





INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang	Penyelesaian BKPN dan outstanding piutang negara melalui Crash Program Keringanan Utang yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap piutang negara/daerah yang berpotensi untuk mengikuti program Crash Program Keringanan Utang	Daftar debitur yang telah mengikuti Crash Program Keringanan Utang	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi Piutang Negara	
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan				
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan				
				Q4: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan				

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Kalimantan Selatan dan Tengah



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Kusumawardhani, S.E.		NAMA	Ronald Silaban
NIP	196908231996032001		NIP	196604231990101001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO (1)	RENCANA HASIL KERJA (2)	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (3)	TARGET (4)	PERSPEKTIF (5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Indeks integritas Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	89,17 100%	Penerima Layanan Penerima Layanan



2.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN Persentase realisasi pokok lelang Persentase penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara	71,5% 86,5% 100% 100%	Penerima Layanan Penerima Layanan Penerima Layanan Penerima Layanan
3.	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
4.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100% 100%	Penguatan Internal atau Anggaran Penguatan Internal atau Anggaran
5.	Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara Persentase produktivitas lelang	73,81% 89%	Penguatan Internal atau Anggaran Penguatan Internal atau Anggaran
6.	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	Persentase Deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	Penguatan Internal atau Anggaran
7.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
8.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	85 75%	Penguatan Internal atau Anggaran Penguatan Internal atau Anggaran





LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

		Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi data PNPB Fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
9.	Komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA			
1	Berorientasi pelayanan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		
2	Akuntabel		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		



PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	
4	Harmonis	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hark, dan kewajiban.
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	
5	Loyal	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	
6	Adaptif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	





LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Unduh/tangani secara elektronik

Kusamawardhani
196908231996032001



Unduh/tangani secara elektronik

Rionald Silaban
196604231990101001



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	50 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
	2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sub IKI-1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%



		Standar Barang dan Standar Kebutuhan						
	Sub IKI-2	Tingkat efektifitas pembinaan dan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	86,5%	86,5%
4	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	75	75	75	75	75	75
7	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
8	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%





LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

9	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	90%	90%	84%	84%	73,81%	73,81%
10	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
11	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
12	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
13	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
14	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase penyelesaian program kerja duta transformasi	-	-	-	-	-	75%	75%
16	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
17	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
18	Indeks Pengelolaan	80	80	80	80	80	80	80



	Layanan Informasi Publik (PPID)							
19	Indeks efektivitas UKI	82	82	82	82	82	82	82
20	Tingkat capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani
196908231996032001



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban
196604231990101001





LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: 24C/KN/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-24/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-24A/KN/2024 tanggal 31 Mei 2024 dan dokumen adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-24B/KN/2024 tanggal 18 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula		Menjadi			
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (42,3 M)	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (43,35 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (571M)	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (747,45 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (7,5M)	2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (12,59 M)
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	74%	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	73%

B. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Utama

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (42,3 M)	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (43,35 M)
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (571M)	2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (747,45 M)
2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (7,5M)	2c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (12,59 M)
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	90%	90%	81%	81%	74%	74%	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	90%	90%	81%	81%	73%	73%

Jakarta, 20 November 2024

Menyetujui,
Direktur Jenderal Kekayaan Negara,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban

Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah tanggal 30 Januari 2024 yang telah diubah sesuai dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 31 Mei 2024 dan dokumen adendum Sasaran Kinerja Pegawai tanggal 18 September 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (42,3 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase realisasi pokok lelang	100% (571M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (7,5M)	Penerima Layanan
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	74%	Proses Bisnis
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (43,35 M)	Penerima Layanan

2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase realisasi pokok lelang	100% (747,45 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (12,59 M)	Penerima Layanan
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	73%	Proses Bisnis

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (42,3 M)	2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (43,35 M)
4	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (571 M)	4	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (747,45 M)
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (7,5 M)	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (12,59 M)



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

9	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	90%	90%	81%	81%	74%	74%	9	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	97%	90%	90%	81%	81%	73%	73%
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Pejabat yang dinilai,

Ditandatangani secara elektronik
Kusumawardhani

Jakarta, 20 November 2024

Pejabat penilai kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban